



# LAPORAN KINERJA

(LKj)

Tahun 2019



# LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2019

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
2020

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) Tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK selama Tahun 2019, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat perencanaan kinerja, serta memuat analisis pencapaian kinerja kegiatan yang telah dicapai oleh Pusat Diklat SDM LHK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2019.

Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberi informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung jalannya organisasi secara efektif dan efisien, baik di unit pusat maupun di unit daerah dan menjadi bagian dalam mewujudkan pencapaian peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 di ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sesuai tujuan penyusunannya.

Bogor, 16 Januari 2019

Kepala Pusat,



Novia Widyaningtyas, S.Hut.,M.Sc.

NIP.19701130 199503 2 001



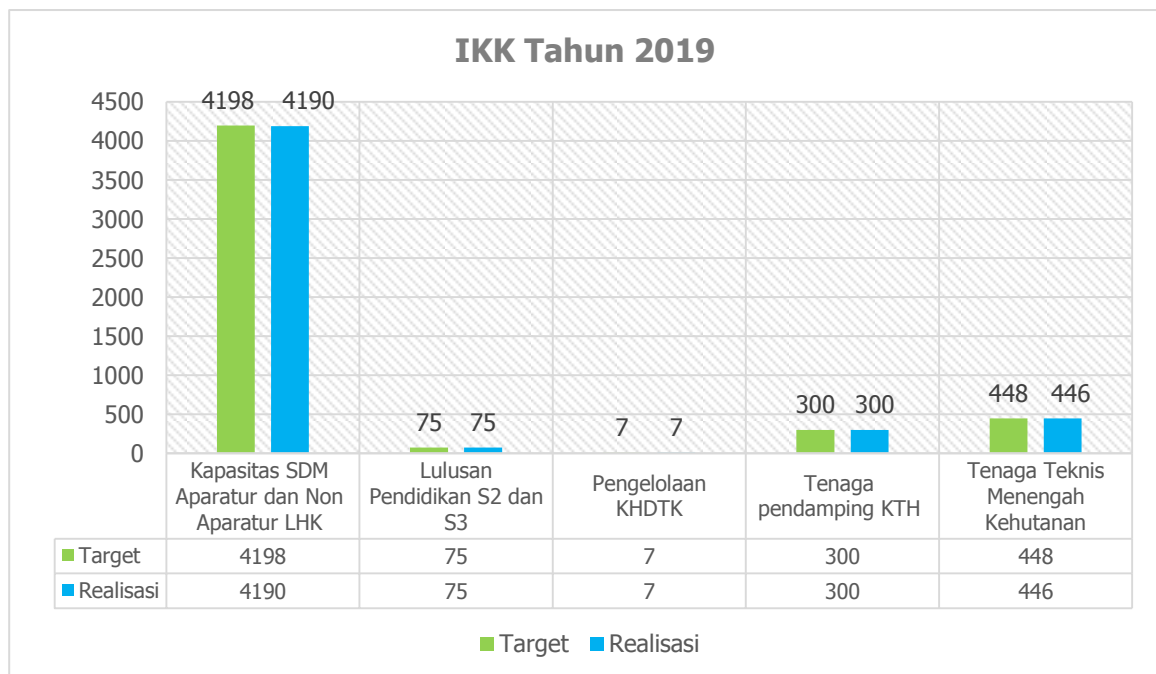
## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) merupakan unit kerja/perangkat organisasi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan P2SDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengacu pada Peraturan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2015 – 2019 diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 187/DIK/PU/OTL.2/10/2017 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, maka pada Tahun 2019 ditetapkan rencana kinerja dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM LHK. Disamping itu Pusat Diklat SDM LHK juga menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja yaitu “Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK, tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karyawan S2 dan S3, tersedianya 7 unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, tersedianya tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, tersedianya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan yang meningkat kapasitasnya dan tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan Kehutanan.” Pada tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK tidak menyelenggarakan diklat untuk tenaga bakti rimbawan. Realisasi keuangan satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 sebesar Rp.60.999.558.754,- atau sebesar 97,87%, dengan realisasi fisik sebesar 99,87%, sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.



Pengukuran capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 untuk kegiatan indikator kinerja pada kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK sebesar 99,81%, untuk lulusan Pendidikan S2 dan S3 sebesar 100%, Pengelolaan KHDTK sebesar 100%, tersedianya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan yang meningkat kapasitasnya sebesar 100%, dan Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan 99,55% sehingga masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan. Grafik Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK tahun 2019 sebagai berikut:



Pada Tahun 2019 terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam capaian kinerja pelaksanaan diklat yaitu ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai dan sumber daya manusia (widyaiswara dan pengelola diklat) yang profesional dan kompeten. Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan diklat terdapat pula permasalahan tidak tercapainya target jumlah IKK untuk kegiatan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan dengan target sebanyak 448 orang, namun realisasinya 446 orang, dimana terdapat 2 orang yang tidak lulus karena mengundurkan diri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut

iii



perlu adanya pengawasan, pembinaan dan peningkatan melalui remedial, sehingga dapat tercapai target IKK tersebut.

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen terus menerus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
SINGKATAN-SINGKATAN .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	2
3. Pengertian .....	2
4. Manfaat Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah .....	3
5. Landasan Hukum .....	4
B. Tugas dan Fungsi .....	6
C. Organisasi .....	7
1. Struktur Organisasi .....	7
2. Sumber Daya Manusia .....	8
3. Sarana dan Prasarana .....	10
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis Pusat Diklat SDM LHK 2015-2019 .....	12
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2019.....	12



C. Rencana Kinerja/Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2019.....	14
D. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019.....	38
E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) .....	39
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	41
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	41
1. Review Terhadap Dokumen Perencanaan .....	41
2. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2019.....	46
3. Metode Pengukuran .....	46
4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja .....	48
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	52
B. REALISASI ANGGARAN.....	74
1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja .....	74
2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut .....	75
BAB IV.PENUTUP .....	77
LAMPIRAN	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keadaan Pegawai Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan jabatan pada Tahun 2019 .....	9
Tabel 2	Keadaan Pegawai Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan golongan Tahun 2019 .....	9
Tabel 3	Keadaan pegawai Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019 .....	9
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Kantor di Pusat Diklat SDM LHK.....	10
Tabel 5	Rencana Kerja IKK Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan anggaran Tahun 2019 .....	14
Tabel 6	Perincian Jenis Belanja DIPA BA. 29 Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019 .....	37
Tabel 7	Perincian Sumber Dana DIPA BA. 29 Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019.....	37
Tabel 8	Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK TA.2019.....	38
Tabel 9	Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun Anggaran 2019.....	40
Tabel 10	Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN dan APBN-P Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019.....	42
Tabel 11	Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019.....	44
Tabel 12	Rincian anggaran APBN-P pada Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan akun Tahun 2019.....	46
Tabel 13	Efektifitas Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019.....	50
Tabel 14	Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 .....	51
Tabel 15	Rasio Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 untuk Target Jangka Menengah .....	52
Tabel 16	Target dan Realisasi Jenis Diklat di Pusat Diklat SDM LHK	



	Tahun 2019 .....	54
Tabel 17	Target dan Realisasi Diklat Kepemimpinan di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 .....	55
Tabel 18	Target dan Realisasi Diklat Administrasi di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 .....	56
Tabel 19	Target dan Realisasi Diklat Fungsional di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 .....	57
Tabel 20	Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	59
Tabel 21	Jumlah Lulusan Karyasiswa Pendidikan S2 dan S3 .....	64
Tabel 22	Sebaran Lulusan Tenaga Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2019 .....	73
Tabel 23	Pelaksanaan Capaian Anggaran Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019.....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK .....	8
Gambar 2.	Grafik Capaian Kinerja Lingkup Pusat Diklat SDM LHK .....	53
Gambar 3.	Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III di Pusat Diklat SDM LHK .....	56
Gambar 4.	Sebaran Pelaksanaan Pelatihan di Pusat Diklat SDM LHK dan BDLHK Tahun 2019 .....	59
Gambar 5.	Suasana Kegiatan Pelatihan di Kelas.....	62
Gambar 6.	Presentasi Hasil Studi Karyasiswa untuk Program Doktor (S3) .....	64
Gambar 7.	Praktek Kerja bagi siswa SMK Kehutanan agar memiliki kompetensi dan siap berkompetisi di Dunia Usaha dan.....	74
Gambar 8.	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2019 dilaksanakan di Arboretum KLHK dan BDLHK Bogor pada tanggal 14-15 November 2019 diikuti oleh 280 orang dari 5 SMK Kehutanan Negeri binaan KLHK dan 26 SMK Kehutanan binaan Kemendikbud.....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Satuan Kerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2015-2019
- Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK
- Lampiran 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja lingkup Pusat Diklat SDM LHK (termasuk BDLHK dan SMKK)
- Lampiran 4. Rincian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Satker Pusat Diklat SDM LHK
- Lampiran 5. Indikator Kinerja Satuan Kerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2015-2019



## SINGKATAN-SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BLHD	: Badan Lingkungan Hidup Daerah
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUP	: Kelompok Usaha Produktif
LH	: Lingkungan Hidup
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LKj	: Laporan Kinerja
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
P2SDM	: Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PK	: Perjanjian Kinerja
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RSKKNi	: Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SDH	: Sumber Daya Hutan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMKK	: Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. 1. Latar Belakang**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan melakukan Akuntabilitas kinerja masing masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja.

Penyelenggaraan sistem pemerintah yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tujuan seluruh negara di dunia. Tujuan tersebut menjadi sebuah prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Demikian juga dengan pemerintah Republik Indonesia yang juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, pemerintah berkewajiban melaporkan kinerja dalam bentuk akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor P. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi oleh karena itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berkekuatan hukum (legitimate) yang dapat menjamin terselenggaranya



pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan hasil evaluasi kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penentuan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM lingkungan hidup dan kehutanan pada waktu yang akan datang.

## **2. Maksud dan tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif dan fisik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan perencanaan pada waktu yang akan datang.

## **3. Pengertian**

- 1) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- 2) Capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.



- 3) Dampak adalah pengaruh kuat dari suatu kebijakan publik yang mendatangkan akibat/manfaat bagi masyarakat luas.
- 4) Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan pada satuan kerja.
- 5) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
- 6) Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
- 7) Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban yang berisi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah.
- 8) *Output* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 9) *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 10) Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu.
- 11) Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih pendek dari tujuan.
- 12) Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

#### **4. Manfaat Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah**

Manfaat LKj Instansi Pemerintah yaitu untuk:

- 1) Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan





- yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- 2) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
  - 3) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan
  - 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **5. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- 8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11) Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- 12) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.6/SETBP2SDM/2015 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
- 13) Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.263/Diklat-1/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;



- 14) Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.187/DIK/PU/OTL.2/10/2019 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- 15) Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.317/DIK/PU/WAS.0/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 Perubahan Kedua SK.219/DIK/PU/WAS.0/11/2018 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satker Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019;
- 16) Surat Pengesahan DIPA Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SP DIPA-029.08.1.400210/2019 tanggal 26 Desember 2019.

## **B. Tugas dan Fungsi**

### **a. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;



- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) Bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **C. Organisasi**

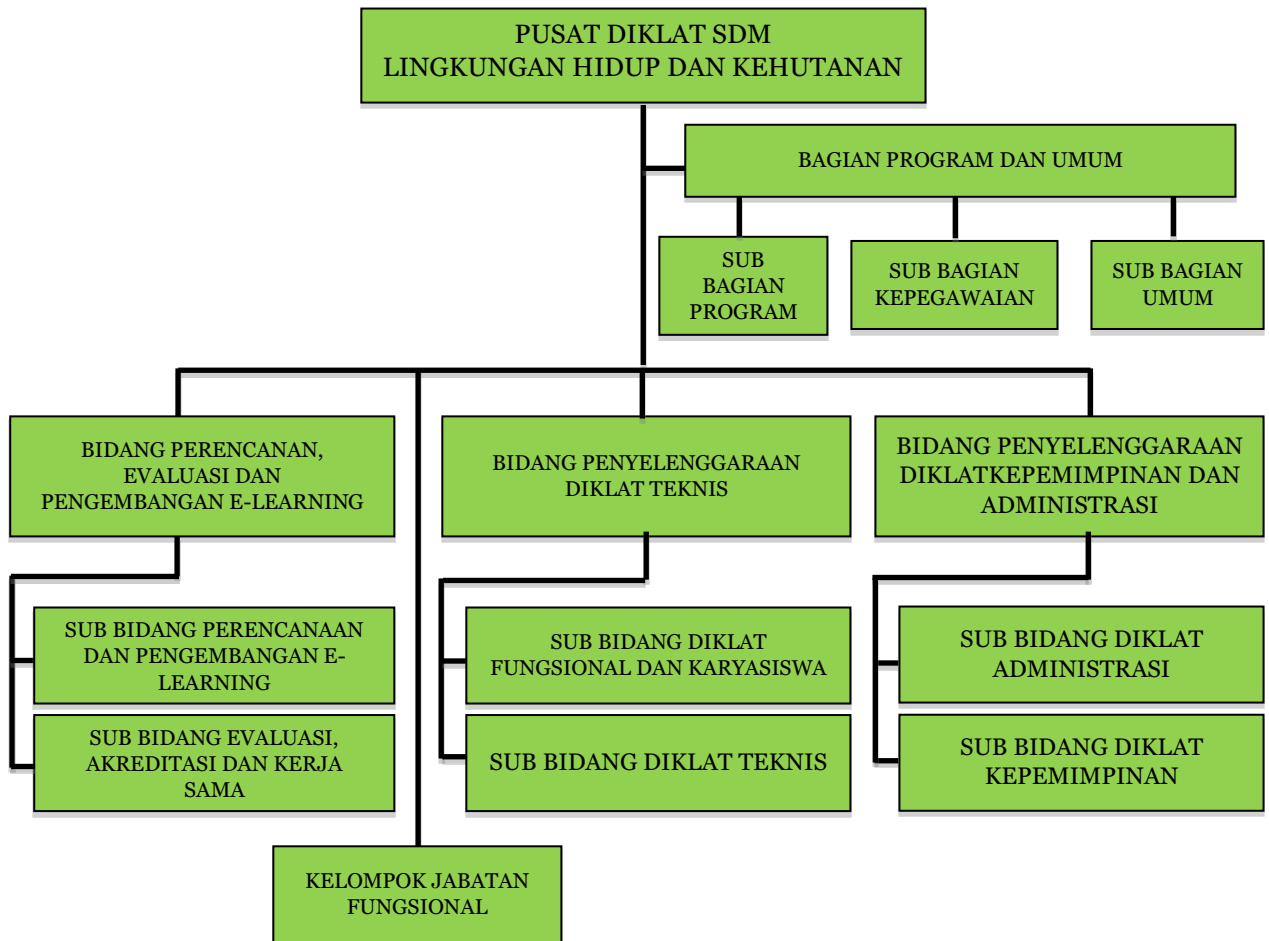
### **1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan, evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara elektronik.
2. Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pelatihan kepemimpinan dan administrasi.
4. Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan program, anggaran, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan umum.



Struktur organisasi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK

## 2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 adalah sebanyak 143 orang, terdiri dari pejabat Struktural sebanyak 14 orang, pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 35 orang, pejabat Fungsional Arsiparis/Pranata Komputer sebanyak 1 orang, pejabat Fungsional Umum sebanyak 65 orang, CPNS sebanyak 2 orang dan Tenaga Honor/Upah/Kontrak 26 orang. Keadaan pegawai di Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan pada Desember 2019 disajikan pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	14
2	Fungsional Widyaiswara	35
3	Fungsional Arsiparis/Pranata	1
4	Fungsional Umum	65
5	CPNS	2
6	Tenaga Honor/Upah/Kontrak	26
Jumlah		143

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 2. Keadaan Pegawai pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Golongan

Instansi	Golongan																Jumlah (orang)	
	IV					III				II				I				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d
Pusat Diklat SDM LHK	9	9	4	12	3	6	32	9	15	2	2	5	9					117
Jumlah	37					62				18				0				

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 3. Keadaan Pegawai pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019.

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Doktor / Ph.D / S-3	11
2	Master / Magister / S-2	36
3	Sarjana / S-1	23
4	Diploma	13
5	SLTA	46
6	SLTP	8
7	SD	6
Jumlah		143

Keterangan : Termasuk Tenaga Honor/Upah/Kontrak

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan



### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

No.	Prasarana	Luas (m2)	Jumlah (Unit)	Daya Tampung (orang)	Kondisi	Keterangan
1	Ruang Kelas	3.120	10	360	Baik	Fasilitas LCD Projector, Screen, AC, Papan Flip chart, Meja kursi, Komputer, Sound system, printer
2	Ruang Diskusi	120	2	122	Baik	Fasilitas LCD Projector, Screen, AC, Papan Flip chart, Meja kursi, Komputer, Sound system, printer
3	Ruang Makan	240	1	200	Baik	Fasilitas AC, Tapedack, Meja dan Kursi
4	Aula	362	1	200	Baik	Fasilitas AC, LCD, Screen, Podium, Sound system, Laptop, Meja dan Kursi
5	Asrama	5.026	1	140	Baik	Fas : AC, TV, kamar mandi dalam, tempat belajar, Hall/Gordon
6	Perpustakaan	105	1	20	Baik	Fas : Full AC, Koleksi buku, Desktop, printer, Wifi
7	Media Center	105	1	10	Baik	Fasilitas AC, Komputer Spesifikasi



No.	Prasarana	Luas (m2)	Jumlah (Unit)	Daya Tampung (orang)	Kondisi	Keterangan
						Khusus, Printer, Wifi
8	Tempat Ibadah (Mesjid)	185	1	120	Baik	Masjid Ass – Salam
9	Laboratorium Bahasa Inggris dan Komputer	122	2	20	Baik	Fasilitas lengkap : AC, computer, software Bahasa Inggris, LCD Projector, Screen, Printer, Sound System
					Baik	Ruang Ulin: Fasilitas Full AC, PC. Komputer, Server, LCD Projector, Printer, Flip Chart, Layar LCD, Meja Kursi, dll
10	Rumah Dinas	147	1		Baik	
11	Sarana Olah raga	300	3		Baik	Fasilitas Alat Kebugaran (fitness), AC
12	Gedung Kantor	1.380	1		Baik	
13	Kendaraan Roda 6		2		Baik	Bus dengan kapasitas 24 orang
14	Kendaraan Roda 4		14		Baik	13 Minibus, 1 Micro Bus
15	Kendaraan Roda 2		5		Baik	
16	Pick Up		1		Baik	
17	Mobil Patroli		1		Baik	
18	Komputer P.C.		138		Baik	138 Baik
19	LCD Projector		27			21 Baik, 3 RR, 3 RB
20	Digital Camera		25			20 Baik, 5 RB
21	Video Camera		2		Baik	2 Baik
22	Printer		137		Baik	137 Baik





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 – 2019.**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK.263/Diklat-1/2015 tanggal 19 November 2015 mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.06/SETBP2SDM/2015 Tahun 2015 – 2019 merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan diklat, baik diklat administrasi, diklat kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional dan kependidikan.

Pusat Diklat SDM LHK merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Badan P2SDM yang dituntut untuk mampu menyelenggarakan diklat aparatur dan non aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan diklat dan kependidikan selama jangka waktu satu periode (5) tahun secara terarah dan berkesinambungan tercantum dalam dokumen Renstra Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2015 – 2019. Matriks Renstra Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2015 - 2019 sebagaimana pada Lampiran 1.

#### **B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2019**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 memuat uraian tercantum dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana Renstra Tahun 2015 – 2019. Rencana Kerja Tahunan (RKT) berisi sasaran program dari kegiatan yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan laporan kinerja (LKj) Pusat Diklat SDM LHK.



Substansi Renja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 merupakan jabaran lebih lanjut dari 8 sasaran yang ada pada RKT Pusat Diklat SDM LHK, yang terdiri dari:

1. Meningkatnya kapasitas aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelenggaraan diklat administrasi, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
2. Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan;
3. Terselenggaranya pembinaan pendidikan kehutanan tingkat menengah;
4. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada 5 unit kerja SMK Kehutanan;
5. Terselenggaranya pengelolaan pendidikan lanjutan program pasca sarjana;
6. Meningkatnya kemampuan organisasi Pusat Diklat SDM LHK beserta UPT dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas;
7. Terwujudnya hutan diklat yang dikelola sesuai kriteria dan standar pengelolaan; dan
8. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Dokumen Renja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan/usulan rencana kerja dan anggaran masing – masing bagian di lingkup Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019. Adapun pagu anggaran Renja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 adalah sebesar Rp.62.326.918.000,- yang merupakan 18,79% dari pagu Badan P2SDM sebesar Rp. 331.744.430.000,- untuk penyelenggaraan program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM. Pagu rencana kerja Indikator Kinerja kegiatan Pusat Diklat SDM LHK sebesar Rp. 41.533.533.000,-. Rincian Rencana Kerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 sebagaimana Tabel 5.



Tabel 5. Rencana Kerja IKK Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan Anggaran Tahun 2019

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp).	Keterangan
1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	a. Tersedianya SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebanyak 35.000 orang	34.513.533.000,-	merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
	b. Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3) sebanyak 340 orang	1.890.000.000,-	
	c. Terbentuknya 7 (tujuh) unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	100.000.000,-	
	d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 15.000 orang	-	
	e. Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 5.000 orang	30.000.000,-	
2. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (SMKK)	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 2.300 orang	5.000.000.000,-	

Keterangan: (\*) Pada tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK tidak menyelenggarakan diklat Bakti Rimbawan

### C. Rencana Kinerja/Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2019

Rencana Kinerja merupakan rencana pelaksanaan kegiatan pada Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung penyelenggaraan diklat dan kependidikan dengan total anggaran kediklatan sebesar Rp.62.326.918.000,- yang terbagi dalam 4 (empat) unit kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning yang dijabarkan dalam elemen kegiatan:



## 1) Perencanaan dan Pengembangan E-Learning, komponen kegiatannya yaitu

### 1.1. Hibah Luar Negeri

Pada tahun 2019, Pusat Diklat SDM LHK masih melanjutkan program hibah kerjasama dengan Forest Investment Programme (FIP), yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan mitigasi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan (REDD+) di daerah serta untuk meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adat serta komunitas lokal dalam menerapkan REDD+ melalui pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak dan provinsi.

Indonesia dengan dukungan FIP sedang membuat terobosan-terobosan dalam pengelolaan hutan. Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan pengelolaan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang ditujukan untuk memperbaiki tata kelola hutan yang diarahkan untuk mewujudkan lingkungan bisnis yang kondusif, peluang investasi dalam *Sustainable Forest Management* (SFM), manajemen hutan berbasis komunitas (CBFM) dan REDD+.

Pusat Diklat SDM LHK sebagai lembaga diklat bidang lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai tupoksi menyelenggarakan diklat dan menyediakan sarana dan metodologi kediklatan berupa kurikulum dan modul diklat. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program tersebut adalah: Kompilasi/adaptasi materi; Pengembangan Modul Baru (Elektronik); Pengembangan Modul KMIS; *Training of Trainers* (ToTs) On KMIS; Pengembangan Modul Baru; Workshop Validasi di Pusat/Regional (Evaluasi Pasca Diklat); *Training On KMIS Regional*; Training Workshop *Blanded Learning*; Workshop *Memberships to Professional Organizations*; *Face to Face on Site Training (Blanded Learning For Various Training)* untuk 10 jenis diklat; *Central Level Administration-Knowledge Centre Developer*; *KPH Operationalization and Change Management Trainings*; *Forum*; *Competitions*; *Product*

15



*Development; Decision Support Systems; Workshop Development Curriculum, Module and Silabus related KPH to Generate Income and Reducing Carbons Emission; Support For Specialized Trainings such as Facilitator for Private Extention; Training Workshop POM, Save Guard and M&E Awareness Refresher for PMU National (In-House Training) Workshop POM, Save Guards and M&E Awareness and Refresher for Supporting Unit; Strategic Communication Effort that Leverage the Knowledge Product and Various Knowledge Platform (Face to Face and Virtual Available).* Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.4.657.000.000,-.

1.2. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai sarana pembelajaran kediklatan sebanyak 7 unit

Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa 7 unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan sebagai implementasi dari misi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur LHK dan non aparatur LHK.

Untuk mencapai IKK di atas, ditetapkan kebijakan meningkatkan pembinaan pengelolaan kawasan hutan diklat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,-.

## 2) Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama

Komponen kegiatan pada sub bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama yaitu:

### 2.1. Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial tenaga pengelola kediklatan perlu dilakukan akreditasi terhadap kelembagaan diklat eksternal dan internal maupun terhadap program diklat. Akreditasi lembaga diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan terhadap kualitas penyelenggaraan diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur-unsur lembaga diklat. Lembaga

16



diklat internal adalah seluruh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan lembaga diklat eksternal adalah Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM Perum Perhutani. Anggaran untuk membiayai kegiatan akreditasi lembaga diklat tahun 2019 adalah sebesar Rp.188.868.000,-.

## 2.2. Monitoring, Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Diklat

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan diklat dan merumuskan penyelesaiannya sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelaksanaan diklat di masa mendatang. Kegiatan ini terdiri dari: Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Kinerja (LKj), dan penyusunan statistik diklat. Anggaran untuk kegiatan ini tahun 2019 adalah sebesar Rp.143.819.000,-.

## 2.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki kehandalan dalam pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan aset BMN, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini tahun 2019 adalah sebesar Rp.34.402.000,-.

## 2.4. Evaluasi Pasca Diklat (EPD)

Diklat yang berkualitas adalah yang mampu meningkatkan kompetensi peserta diklat sesuai dengan tujuan diklat, dan pada gilirannya mampu meningkatkan kinerja para peserta diklat di tempat tugasnya. Kegiatan evaluasi pasca diklat (EPD) dimaksudkan untuk mengetahui dampak diklat terhadap kinerja para peserta diklat setelah mengikuti proses



diklat. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah diperolehnya bahan acuan untuk perbaikan penyelenggaraan diklat yang akan datang, meliputi: kualitas dan kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta diklat/organisasi, metoda dan alat bantu pembelajaran, lokasi praktek, kualitas pengajar/widyaiswara, kualitas penyelenggara, kecukupan sarana dan prasarana diklat, dll. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.83.530.000,-.

#### 2.5. Buku Terbitan/Majalah/Leaflet

Dalam rangka publikasi dan informasi program dan hasil kediklatan serta sebagai salah satu upaya pengembangan profesi widyaiswara, maka diterbitkan majalah kediklatan sebanyak 3 edisi dalam setahun, penerbitan buku (3 judul) dan leaflet (3 judul). Majalah, leaflet dan buku terbitan tersebut didistribusikan kepada pihak-pihak terkait (pengguna diklat), sehingga semua pihak dapat memperoleh informasi kediklatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.132.562.000,-.

#### 2.6. Pengelolaan Informasi Kediklatan

Dalam era informasi dan komunikasi yang semakin canggih, maka diklat lingkungan hidup dan kehutanan telah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas publikasi dan akselerasi komunikasi kediklatan di seluruh unit kerja lingkup Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui website portal.pusdiklatsdmlhk.id, untuk operasional pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kediklatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.886.000,- .

#### 2.7. Pengembangan Kerjasama Kediklatan

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kediklatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan diklat berkelanjutan melalui kerjasama kediklatan dengan pihak-pihak terkait, baik dalam bentuk penyediaan



dana, tenaga pengajar/narasumber, moderator, sarana prasarana dan pengembangan kurikulum secara sistemik sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pengguna diklat yang terus berkembang. Untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terkait, perlu dilakukan penyusunan bahan kerjasama maupun peningkatan kapasitas SDMnya. Anggaran untuk kegiatan kerjasama kediklatan ini sebesar Rp.150.473.000,-.

## 2.8. Bintel Teknik Bundling Untuk Evaluasi Diklat Secara *Online*

Evaluasi diklat diperlukan dalam proses pelaksanaan diklat sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan diklat di masa mendatang, meliputi evaluasi terhadap pengajar, materi/bahan ajar, pengelola/panitia penyelenggara dan sarana prasarana diklat. Mengingat pentingnya evaluasi dalam kegiatan kediklatan, perlu adanya pengembangan sistem evaluasi, diantaranya evaluasi pelaksanaan diklat dan evaluasi pasca diklat secara online, sehingga dapat lebih efektif dan efisien, serta mengurangi penggunaan kertas/*paperless*. Agar evaluasi secara online dapat dilaksanakan dengan benar dan tercapai tujuan, perlu adanya bimbingan teknis evaluasi diklat secara *online* bagi para penyelenggara diklat. Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.34.186.000,-.

## 2. Penyelenggaraan Diklat Teknis

### 1) Komponen kegiatan dalam penyelenggaraan diklat teknis yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (PMKK)  
Indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan adalah tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 448 orang. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembina teknis bagi SMK Kehutanan Negeri yang terdapat di 5 lokasi yaitu SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, SMK Kehutanan Negeri Makassar, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, SMK

19





Kehutanan Negeri Samarinda, dan SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Sebagai Pembina teknis, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan system pendidikan di SMK Kehutanan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain dalam bentuk:

- a) Penyusunan dan Pembahasan Silabus dan Bahan Ajar Mata Pelajaran Pembukaan Wilayah Hutan dan Pengujian Kayu Gergajian, Pembinaan Hutan;
- b) Workshop Persiapan Uji Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan;
- c) Pembinaan Teknis SMK Kehutanan;
- d) Lomba Karya Siswa (LKS) SMK Kehutanan;
- e) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru SMK Kehutanan Kompetensi Keahlian Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Mata Pelajaran Pengukuran dan Perpetaan Digital;
- f) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru SMK Kehutanan Kompetensi Keahlian Teknik Produksi Hasil Hutan Mata Pelajaran Pengujian Kayu Bulat dan Kayu Gergajian;
- g) Pembahasan Bank Soal Tahun 2020;
- h) Workshop Pengembangan Alat Bantu Pembelajaran dengan Multimedia;
- i) Workshop Manajemen Pengelolaan Sekolah *Boarding School*;
- j) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru SMK Kehutanan Kompetensi Keahlian Teknik Konservasi Sumber daya Hutan Mata Pelajaran Pembinaan Habitat dan Populasi;
- k) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru SMK Kehutanan Kompetensi Keahlian Teknologi Produksi Hasil Hutan Mata Pelajaran Pemanenan Hasil Hutan;
- l) Magang/Studi Banding Guru SMK Kehutanan ke Dunia Usaha dan Industri;



- m) Workshop Pengelolaan Kelas;
- n) Workshop Pengembangan SMK Kehutanan.

Output kegiatan pembinaan teknis SMK Kehutanan berupa Dokumen Perencanaan dan Pembinaan tahun 2019. Anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp.5.000.000.000,-.

b. Workshop Revitalisasi Kurikulum SMK Kehutanan untuk Persiapan Pra Kerja

Salah satu kebijakan baru pemerintah adalah dengan diluncurkannya kartu pra kerja. Kartu pra kerja merupakan suatu kebijakan yang memberikan pembekalan kepada para calon pekerja dan pengangguran. Melalui kartu tersebut, lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi, yang belum bekerja atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan dibekali pelatihan. Sasaran dari kartu pra kerja ada tiga kelompok yaitu *fresh graduate*, pekerja eksisting, dan korban PHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan 5 sekolah vokasi yaitu SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, SMK Kehutanan Negeri Makassar, SMK Kehutanan Negeri Samarinda dan SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Lulusan sekolah vokasi/SMK Kehutanan bisa menjadi sasaran pemberian kartu pra kerja dari kelompok *fresh graduate*.

Pusat Diklat SDM LHK sebagai pembina teknis SMK Kehutanan berkewajiban untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merevitalisasi kurikulum SMK Kehutanan melibatkan guru-guru SMK Kehutanan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dunia usaha dan dunia industry (DUDI) agar sesuai dengan kebutuhan instansi teknis lingkup Kementerian



Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dunia kerja (dunia usaha dunia industri/DUDI). Anggaran untuk merevitalisasi kurikulum ini dialokasikan sebesar Rp.200.000.000,-.

c. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kehutanan

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kehutanan merupakan kegiatan pendukung kediklatan. Untuk mendukung suksesnya kegiatan LKS, perlu didukung oleh penyediaan sarana prasarana, antara lain: penyewaan peralatan operasional dan sarana produksi panggung. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kehutanan membutuhkan anggaran sebesar Rp.210.000.000,-.

2) Diklat Fungsional dan Karyasiswa

2.1 Diklat Fungsional

Penyelenggaraan diklat fungsional ditujukan bagi pejabat/calon pejabat fungsional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tujuan penyelenggaraan diklat fungsional adalah untuk memenuhi kompetensi pejabat fungsional sesuai dengan jenjang jabatan sekaligus sebagai syarat untuk kenaikan tingkat/jenjang jabatan fungsional.

Komponen kegiatan dalam diklat fungsional adalah:

1) Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).

Diklat Fungsional PEH yang dilaksanakan adalah:

- a. Diklat Pembentukan PEH Tingkat Terampil yang direncanakan akan diikuti oleh 34 orang dengan anggaran sebesar Rp.331.832.000,-.
- b. Diklat Pembentukan PEH Tk. Ahli Angk. I dan Angk. II yang direncanakan akan diikuti oleh 68 orang dengan anggaran sebesar Rp.778.343.000,-.



- c. Diklat Pembentukan PEH Tk. Ahli Angk. III dan Angk. IV yang direncanakan akan diikuti oleh 68 orang dengan anggaran sebesar Rp.731.351.000,-.
- d. Diklat Penjenjangan Fungsional PEH Ahli Jenjang Madya yang direncanakan akan diikuti oleh 33 orang dengan anggaran sebesar Rp.478.731.000,-.

2) Diklat bagi Pejabat Fungsional Polisi Hutan (Polhut)

Diklat Fungsional Polhut yang dilaksanakan adalah:

- a. Diklat Alih Tingkat Polhut Terampil Ke Polhut Ahli dengan rencana jumlah peserta diklat sebanyak 30 orang. Anggaran biaya kegiatan diklat dimaksud sebesar Rp.377.708.000,-.
- b. Diklat Penjenjangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya dengan rencana jumlah peserta sebanyak 40 orang dan anggaran sebesar Rp.381.186.000,-.
- c. Diklat Pembentukan Polhut Tingkat Terampil dengan rencana jumlah peserta sebanyak 26 orang dan anggaran sebesar Rp.823.700.000,-.
- d. Diklat Pembentukan Polhut Tingkat Ahli dengan rencana jumlah peserta sebanyak 79 orang dan anggaran sebesar Rp.2.390.650.000,-.

3) Diklat bagi Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Diklat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan adalah Diklat Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dengan rencana jumlah peserta sebanyak 30 orang dan anggaran sebesar Rp.285.288.000,-.

4) Diklat bagi Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Diklat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) yang dilaksanakan adalah: Diklat Jabatan Fungsional Pengendali Dampak



Lingkungan dengan rencana jumlah peserta sebanyak 30 orang dan anggaran sebesar Rp.189.688.000,-.

5) Diklat Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli di BDLHK Kupang

Pelatihan Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dilaksanakan di BDLHK Kupang selama 10 (sepuluh) hari dengan rencana jumlah peserta sebanyak 60 orang dan anggaran sebesar Rp 511.130.000,-.

6) Diklat Penjenjangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya di BDLHK Pematangsiantar

Diklat Penjenjangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya dilaksanakan di BDLHK Pematangsiantar selama 9 (Sembilan) hari dengan rencana jumlah peserta sebanyak 30 orang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.245.370.000,-.

7) Rakor Diklat Fungsional

Rapat koordinasi diklat fungsional ditujukan untuk sinkronisasi data dengan seluruh Unit Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani peningkatan kapasitas untuk pejabat fungsional terkait kebutuhan diklat bagi pejabat fungsional tahun 2020. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.60.108.000,-.

2.2 Terwujudnya lulusan pendidikan karyasiswa (S2 dan S3) bagi SDM LHK.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks permasalahannya, memerlukan dukungan SDM yang kompeten dan profesional sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan. SDM yang menguasai dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kompetensi manajerial yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup



dan kehumanan secara adil dan lestari yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pengelolaan pendidikan lanjutan program pasca sarjana bagi SDM aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

1) Pendidikan Magister (S-2)

Program pendidikan magister (S-2) bagi ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibiayai dari anggaran DIPA Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruhnya untuk pendidikan magister di dalam negeri, dengan target lulusan tahun 2019 sebanyak 60 orang.

Anggaran untuk program magister (S-2) sebesar Rp.816.555.000,- seluruhnya dialokasikan untuk program pendidikan tahun pertama program magister (S-2) dalam negeri. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kualifikasi pendidikan magister (S-2).

2) Program Pendidikan Doktor (S-3)

Program Pendidikan Doktor (S-3) menargetkan jumlah lulusan tahun 2019 sebanyak 15 orang. Anggaran kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.309.550.000,- untuk pendidikan tahun pertama program doctor (S-3) dalam negeri. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kualifikasi pendidikan doctor (S-3).

3) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan

Selain kegiatan akademis dan operasional karyasiswa sebagaimana di atas, dalam mendukung pendidikan Pasca Sarjana terdapat kegiatan administrasi pengelolaan pendidikan lanjutan yang terdiri dari tes dan pendaftaran program pasca sarjana, presentasi lulusan



karyasiswa, komisi pertimbangan pasca sarjana, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. Kegiatan ini juga diperuntukan bagi karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor/donor/bantuan lembaga/instansi didalam dan luar negeri. Pada tahun 2019 dialokasikan anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu sebesar Rp.763.895.000,- pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terkelolanya pendidikan pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### 3. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi

#### 1) Diklat Kepemimpinan

Diklat mandatory yang harus dilaksanakan terkait kewajiban aparatur dan persyaratan jabatan, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Hal penting yang menjadi perhatian adalah masih terdapat pejabat eselon yang sudah menduduki jabatan struktural namun belum mengikuti pelatihan kepemimpinan, sehingga dipandang perlu untuk mengikuti diklat kepemimpinan guna meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pelaksanaan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mencapai terselenggaranya pelatihan kepemimpinan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan kebijakan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III serta mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II ke Lembaga Administrasi Negara dan Badan Diklat Provinsi yang menyelenggarakan Pelatihan PIM II. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan. Pada tahun 2019 direncanakan 512 orang untuk mengikuti Pelatihan kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV. Komponen kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:



### 1.1. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II diikuti oleh PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan atau telah menduduki jabatan struktural Eselon II. Pada tahun 2019 direncanakan 15 orang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di LAN dan Badan Diklat Provinsi yang menyelenggarakan Diklat PIM II. Anggaran untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dialokasikan dalam pagu tahun 2019 sebesar Rp.300.999.000,-. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memiliki kompetensi/ kemampuan kepemimpinan jenjang jabatan eselon II.

### 1.2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Diklat Kepemimpinan Tingkat III diikuti oleh PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan atau telah menduduki jabatan struktural Eselon III. Pada tahun 2019 direncanakan akan dilaksanakan untuk 60 orang peserta yang terbagi dalam dua angkatan, yaitu angkatan XX dan XXI. Anggaran penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dalam pagu tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.028.711.000,-. Serta 39 orang peserta yang bersumber dari dana insentif dengan anggaran sebesar Rp.835.905.000,-. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memiliki kompetensi/kemampuan kepemimpinan tingkat III.

### 1.3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diikuti oleh PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan atau telah menduduki jabatan struktural Eselon IV. Pada tahun 2019





direncanakan akan dilaksanakan untuk 150 orang peserta yang terbagi dalam tiga gelombang sebanyak lima angkatan, yaitu angkatan XXXI sampai dengan XXXV. Anggaran penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dalam pagu tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.793.900.000,-. Serta 248 orang peserta yang bersumber dari dana insentif dengan anggaran sebesar Rp.4.998.690.000,-. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memiliki kompetensi/kemampuan kepemimpinan tingkat IV.

#### 1.4. Workshop Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan

Workshop Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan merupakan salah satu tahapan penting di dalam proses pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang bertujuan untuk:

- 1) Menambah wawasan terkait substansi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural dan Widyaiswara lingkup Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian tujuan Diklat Kepemimpinan;
- 3) Merumuskan solusi alternatif dari permasalahan/ kendala dalam pencapaian tujuan Diklat Kepemimpinan;
- 4) Menyamakan persepsi antara pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan;

Kegiatan ini akan diikuti oleh 145 orang peserta terdiri dari Pejabat Struktural dan Widyaiswara lingkup Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK dengan jumlah anggaran sebesar Rp.310.900.000,-.

#### 1.5. Workshop Service Excellence

Workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan prima bagi widyaiswara dan penyelenggara diklat agar pelaksanaan



diklat lebih optimal. Kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh 50 orang peserta selama 1 hari. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.39.900.000,-.

## 2. Diklat Administrasi

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Pusat Diklat SDM LHK pada tahun anggaran 2019 diwajibkan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. Adapun komponen kegiatan yang dilaksanakan adalah:

### 2.1. Pelatihan Dasar CPNS bagi Golongan II dan III

Diklat ini dilaksanakan oleh 497 orang CPNS yang terdiri dari 390 orang CPNS Golongan III dan 107 orang CPNS Golongan II formasi tahun 2018 yang akan diselenggarakan dalam Sembilan gelombang sebanyak enam belas angkatan. Pelatihan dasar bagi CPNS ini merupakan salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun anggaran untuk membiayai pelatihan dasar tersebut adalah sebesar Rp.6.518.964.000,-.

### 2.2. Diklat Assesor (*Recognition Current Competency*)

Diklat ini direncanakan diikuti dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang yang berasal dari Pusdiklat SDM LHK dan dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 3 hari dengan jumlah anggaran sebesar Rp.340.095.000,- dengan tujuan yaitu untuk memperpanjang lisensi sertifikat assesor kompetensi yang masa berlakunya sudah habis.



### 2.3. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan diklat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan. Kegiatan tersebut berupa rapat-rapat/koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait dan koordinasi/konsultasi penyelenggaraan diklat. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.266.545.000,-.

### 2.4. Workshop Latsar

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS, diperlukan pengampu pelatihan dan penyelenggara diklat yang kompeten dan sudah mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini, dengan sebab itu Pusat Diklat SDM LHK akan mengadakan kegiatan Workshop Latsar untuk menyamakan standar operasional prosedur penilaian, pengujian, penjabaran tugas penguji dan tugas couch dengan pengajar dan narasumber yang berasal dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Workshop ini direncanakan akan diikuti oleh perwakilan widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK sebanyak 40 orang selama 3 (tiga) hari. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah Rp.228.144.000,-.

## 4. Layanan Program dan Umum

### 1) Program, komponen kegiatannya yaitu:

#### 1.1. Pembuatan Renja dan Monitoring IKK

Rencana Kerja (Renja) dibuat setiap tahun yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan menyeluruh mengenai perencanaan kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana kerja wajib disusun oleh suatu instansi/lembaga sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Monitoring IKK

30



perlu dilaksanakan guna memonitor perkembangan pencapaian IKK. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah sebesar Rp.131.703.000,-.

#### 1.2. Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, perlu disusun dokumen perencanaan yaitu Perencanaan dan Penyusunan Program Anggaran (RKAKL/DIPA). Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan perencanaan dan penyusunan program anggaran ini terdiri dari kegiatan perjalanan pimpinan (Kapusdiklat), konsultasi/koordinasi anggaran, menghadiri rapat-rapat terkait anggaran, pelaksanaan revisi anggaran tahun 2019 di tingkat Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dan revisi tingkat DJA serta penyusunan anggaran tahun 2020. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2019 adalah sebesar Rp.273.885.000,-.

#### 1.3. Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001;2015

Penerapan kegiatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dimaksudkan agar Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menyelenggarakan diklat dengan lebih baik, melalui prinsip: komitmen manajemen, perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp.113.134.000,-.

#### 1.4. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 300 orang

Indikator kinerja kegiatan jumlah unit tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat



kapasitasnya adalah sebagai implementasi dari misi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur LHK dan non aparatur LHK.

Dalam rangka pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kegiatan pendampingan Kelompok Tani Hutan sangat penting. Untuk itu tenaga pendamping KTH yang berasal dari Penyuluh Kehutanan perlu ditingkatkan pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya melalui penyelenggaraan Diklat Pendampingan Kelompok Tani Hutan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusdiklat SDM LHK dalam hal ini berperan sebagai penyedia bahan ajar diklat, kurikulum dan silabus diklat, sertifikat/STTPP diklat. Untuk memastikan proses pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan jumlahnya sesuai dengan target IKK serta sebagai upaya perbaikan untuk kegiatan di tahun berikutnya maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi IKK Diklat Pendampingan KTH. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut dalam pagu tahun 2019 adalah sebesar Rp.30.000.000,-.

## 2) Kepegawaian, komponen kegiatannya yaitu:

### 1.1. Kewidyaiswaraan

Salah satu faktor untuk menjadi lembaga diklat yang berkualitas adalah tersedianya Widyaiswara yang kompeten dalam mengampu mata diklat. Untuk itu perlu ditunjang dengan pelayanan kesekretariatan Widyaiswara serta pengembangan profesi. Kebutuhan Kesekretariatan widyaiswara antara lain adalah pembelian ATK dan bahan operasional komputer, fotocopy, biaya rapat-rapat, sedangkan untuk pengembangan profesi antara lain penelaahan DUPAK, penyusunan tabulasi angka kredit jabatan fungsional widyaiswara, penelitian kediklatan dll. Anggaran untuk



melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.147.054.000,-.

#### 1.2. Kepegawaian

Dalam rangka menunjang administrasi kepegawaian dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara Pusat Diklat SDM LHK diperlukan anggaran untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Penyusunan mutasi/administrasi kepegawaian (formasi, kenaikan pangkat, jabatan, laporan-laporan kepegawaian Triwulan 1, 2, 3, dan 4 semester 1, 2 dan tahunan), pembelian ATK, pembinaan/supervisi/ koordinasi pendidikan dan kediklatan serta mengikuti rapat-rapat/konsultasi. Anggaran yang disediakan dalam pagu tahun 2019 untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.130.347.000,-.

#### 1.3. Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi dan pengetahuan pegawai Pusat Diklat SDM LHK harus selalu ditingkatkan kualitasnya sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai adalah dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi, dan seleksi widyaiswara. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pagu APBN tahun 2019 adalah sebesar Rp.68.000.000,-.

#### 1.4. Pembinaan Pegawai

Pembinaan pegawai merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.288.692.000,-.

### 2) Umum, komponen kegiatannya yaitu:

#### 2.1. Pembayaran gaji dan tunjangan (gaji, TPPK)



Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak lebih dari 122 orang pegawai PNS atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2019 adalah sebesar Rp.16.288.687.000,-.

#### 2.2. Ketatausahaan/BMN/Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga kediklatan dan peserta diklat diperlukan anggaran untuk membiayai kegiatan Ketatausahaan/BMN/Keuangan. Kegiatan tersebut digunakan untuk operasional perpustakaan, rapat-rapat pembahasan serta koordinasi/konsultasi ketatausahaan/BMN/Keuangan. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.250.154.000,-.

#### 2.3. Operasional Perkantoran

Kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan layanan perkantoran (langganan koran dan majalah, biaya operasional asrama, gaji petugas pramu bakti/teknisi/ satpam, pengemudi, honor pengelola kegiatan, langganan internet, fotocopy, penggandaan, penjilidan, biaya rapat-rapat, jasa pos dan giro, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan listrik, langganan telepon, air dan gas). Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.713.436.000,-.

#### 2.4. Honor Pengelola Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan hak dari pengelola kegiatan antara lain adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Uang Persediaan, Pengelola SAI dan BMN, Pengelola PNBPN, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/ Jasa, Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna



Barang. Anggaran dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp.345.210.000,-.

#### 2.5. Perawatan Sarana Perkantoran

Kegiatan ini terkait dengan biaya operasional dan perbaikan peralatan kantor berupa AC Split, Pompa air, Mesin potong rumput, Personal Computer, Peralatan meubeler, Peralatan Fitness, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan LCD Projector, Peralatan Karaoke, Genset, Pemeliharaan Inventaris kantor, sehingga perangkat kerja dimaksud dapat berfungsi dan layak digunakan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp.192.436.000,-.

#### 2.6. Perawatan Kendaraan Bermotor

Kendaraan merupakan salah satu unit pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang sangat diperlukan keberadaannya. Oleh karenanya agar dapat tetap berfungsi dengan optimal perlu dilakukan pemeliharaan dengan kegiatan berupa perbaikan, rehabilitasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan penyediaan bahan bakar. Perawatan meliputi: kendaraan pejabat Eselon II, kendaraan operasional roda-4, pemeliharaan kendaraan operasional roda-2, biaya pemeliharaan dan operasional Kendaraan Roda 6 serta biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional lapangan (double gardan). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp.402.566.000,-.

#### 2.7. Pengadaan Seragam Pramubakti

Kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa pengadaan seragam pramubakti. Anggaran kegiatan ini dalam pagu APBN adalah sebesar Rp.16.150.000,-.





## 2.8. Perawatan Gedung Kantor

Kegiatan ini terkait dengan biaya perawatan gedung agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsinya yang terdiri dari :pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat, pemeliharaan jaringan listrik, telepon, PAM dan gas, pemeliharaan jaringan LAN dan Internet. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp.1.335.440.000,-.

## 2.9. Pengadaan Peralatan Asrama dan Dapur

Salah satu sarana penunjang kegiatan diklat adalah kenyamanan bagi peserta diklat sehingga para peserta diklat dapat melaksanakan diklat dengan baik. Salah satu upaya tersebut adalah berupa pengadaan spre, bed cover dan peralatan dapur dan asrama. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.105.000.000,-.

## 2.10. Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh Bagi Satpam

Dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Satuan Pengamanan (Satpam) diperlukan kondisi fisik yang prima karena harus bekerja pada waktu siang dan malam. Maka dari itu Pusat Diklat SDM LHK memberikan anggaran penambah daya tahan tubuh. Yaitu berupa suplemen makanan dan penambah daya tahan tubuh guna mengoptimalkan kinerja bagi satpam. Anggaran kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.44.460.000,-.

## 2.11. Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penyelenggara diklat selalu berupaya untuk melaksanakan diklat yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut antara lain diperlukan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan operasional. Oleh karena itu Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan



pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu berupa pengadaan Laptop penunjang operasional kantor dan pengadaan LCD Projector guna menunjang penyelenggaraan diklat. Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.350.000.000,-.

Dari total alokasi DIPA BA. 29 unit Badan P2SDM TA. 2019 tersebut, alokasi pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan diklat dan kependidikan sebesar Rp.62.326.918.000,- terdiri dari sumber dana RM sebesar Rp.57.669.918.000,- atau sebesar 92,53%, untuk tahun 2019 tidak menggunakan sumber dana jenis belanja PNP, dan sumber dana jenis belanja HLN sebesar Rp. 4.657.000.000,- atau sebesar 7,47%. Perincian alokasi per jenis belanja dan Rencana Kinerja Pusediklat SDM LHK TA. 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 6, 7 dan 8.

Tabel 6. Perincian Jenis Belanja DIPA BA.29 Pusediklat SDM LHK TA.2019

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	16.288.687.000,-	26.13
52	Belanja Barang	45.688.231.000,-	73.30
53	Belanja Modal	350.000.000,-	0.56
TOTAL		62.326.918.000,-	100.00

Tabel 7. Perincian Sumber Dana DIPA BA. 29 Pusediklat SDM LHK TA. 2019

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Persentase (%)
1	RM	57.669.918.000,-	92.53
2	PNP	-	-
3	HLN	4.657.000.000,-	7.47
TOTAL		62.326.918.000,-	100.00

Tabel 8. Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK		57.326.918.000,-
5441.001	Jumlah Kapasitas SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya	1.602 Orang	34.513.533.000,-
5441.002	Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	75 Orang	1.890.000.000,-
5441.003	Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	7 Unit	100.000.000,-
5441.005	Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya	300 Orang	30.000.000,-
5441.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	350.000.000,-
5441.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	20.443.385.000,-
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	448 Orang	5.000.000.000,-
TOTAL			62.326.918.000,-

#### D. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019

Perjanjian kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi/lembaga. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penetapan Kinerja, istilah penetapan kinerja telah diubah menjadi perjanjian kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;



2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya DIPA 029 Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019 dengan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400210/2019 tanggal 26 Desember 2019 telah dilaksanakan Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019 antara Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan P2SDM pada bulan Desember 2018 kemudian Revisi Perjanjian Kinerja antara Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan P2SDM pada bulan Oktober Tahun 2019, sebagaimana Lampiran 2.

#### **E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 8 sasaran, dimana dari sasaran tersebut terdapat 2 kegiatan dengan 6 indikator kinerja Kegiatan (IKK). Kegiatan dimaksud merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja suatu instansi pemerintah.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Pusat Diklat SDM LHK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan diklat administrasi, diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan dan kependidikan lingkup kementerian LHK. IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 sebagaimana Tabel 9.



Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Diklat SDM LHK Tahun Anggaran 2019

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019		Target 2019		
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a.	Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	35.000	Orang	4.198	Orang
		b.	Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	340	Orang	75	Orang
		c.	Terbentuknya unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	7	Unit	7	Unit
		d.	Tersedianya tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya	15.000	Orang	-*	-*
		e.	Tersedianya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya	5.000	Orang	300	Orang
2.	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (K3)	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	2.300	Orang	448	Orang	

Keterangan: (\*) Pada tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK tidak menyelenggarakan diklat Bakti Rimbawan



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **1. Review terhadap Dokumen Perencanaan**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kualitas dan kuantitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi operasionalisasi kebijakan tersebut di atas, maka kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas aparatur dan pihak-pihak lain (*stake holder*) yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Peningkatan profesionalisme aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan melalui proses diklat lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat memenuhi kebutuhan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan yang memiliki kemampuan teknis, kepemimpinan, komitmen dan moralitas yang tinggi serta meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kerjasama di dalam melaksanakan pekerjaan atau penyelenggaraan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, disamping guna mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Pagu anggaran yang diberikan kepada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.52.554.509.000,-. Sehubungan dengan pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian LHK (BA 029) untuk Insentif TA 2019 atas Kinerja Anggaran Kementerian LHK TA 2018 pada Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, terdapat penambahan dari 7 (tujuh) Satker, yaitu Sekretariat Badan P2SDM, Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Balai Diklat LHK Pekanbaru, Balai Diklat LHK Kadipaten, Balai Diklat LHK Samarinda, dan Balai Diklat LHK Makassar.



Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp.7.220.375.000,- yang dialokasikan untuk kebutuhan diklat mandatori yaitu Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 43 orang, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 300 orang dan revitalisasi kurikulum SMK Kehutanan untuk kartu pra kerja. Selain itu, dalam mendukung optimalisasi penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja K/L dan kualitas belanja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan realokasi antar program, dimana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mendapat alokasi belanja pegawai sebesar Rp.7.500.000.000,- yang akan disebar ke 15 satker. Pusat Diklat SDM LHK mendapat alokasi belanja pegawai sebanyak Rp.2.552.034.000,- untuk menutup kekurangan belanja pegawai tahun 2019. Dengan adanya dana insentif dan realokasi belanja pegawai tersebut, pagu anggaran Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertambah menjadi Rp.62.326.918.000,-. Maka disusunlah kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2019.

Kronologis revisi anggaran DIPA APBN Pusat Diklat SDM LHK Perincian Jenis Belanja DIPA BA. 29 Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 serta Revisi Rencana anggaran berdasarkan sumber dana dan Revisi anggaran berdasarkan kegiatan sebagaimana Tabel 10, 11 dan 12.

Tabel 10. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN dan APBN-P Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019

No.	URAIAN	PAGU	NOMOR PENGESAHAN
1	DIPA APBN	52,554,509,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 05 Desember 2018
2	REVISI-1	52,554,509,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 17 Januari 2019
3	REVISI-2	52,554,509,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 28 Maret 2019
4	REVISI-3	52,554,509,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 28 Mei 2019
5	REVISI-4	52,554,509,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 25 Juni 2019
6	REVISI-5	52,554,509,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 22 Juli 2019
7	REVISI-6 (DJA)	59,774,884,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019



No.	URAIAN	PAGU	NOMOR PENGESAHAN
	(Penambahan Dana Insentif)		tanggal 07 Agustus 2019
8	REVISI-7 (DJA) (Penambahan Belanja Pegawai)	62,326,918,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 05 September 2019
9	REVISI-8	62,326,918,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 30 September 2019
10	REVISI-9	62,326,918,000,- -	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 12 November 2019
11	REVISI-10	62,326,918,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 29 November 2019
12	REVISI-11	62,326,918,000,-	SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 26 Desember 2019





Tabel 11. Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Pusat Diklat SDM LHK TA. 2019

No.	Tanggal Pengesahan	Pagu Semula (Rp)				Pagu Menjadi (Rp)			
		RM	PNP	HLN	JUMLAH	RM	PNP	HLN	JUMLAH
1	APBN SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 05 Desember 2018	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-
2	REV-1 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 17 Januari 2019	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-
3	REV-2 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 28 Maret 2019	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-
4	REV-3 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 28 Mei 2019	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-
5	REV-4 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 25 Juni 2019	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-
6	REV-5 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 22 Juli 2019	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-
7	REV-6 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 07 Agustus 2019	47.897.509,-	-	4.657.000,-	52.554.509,-	55.117.884,-	-	4.657.000,-	59.774.884,-



8	REV-7 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 05 September 2019	55.117.884,-	-	4.657.000,-	59.774.884,-	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-
9	REV-8 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 30 September 2019	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-
10	REV-9 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 12 November 2019	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-
11	REV-10 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 29 November 2019	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-
12	REV-11 SP DIPA - 029.08.1.400210/2019 tanggal 26 Desember 2019	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-	57.669.918,-	-	4.657.000,-	62.326.918,-



Tabel 12. Rincian Anggaran APBN-P pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Akun Tahun 2019 (Satker Pusat Diklat SDM LHK 400210)

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Penambahan
5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	47.554.509.000,-	57.326.918.000,-
5441.001	Jumlah Kapasitas SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya	27.384.485.000,-	34.513.533.000,-
5441.002	Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	2.100.000.000,-	1.890.000.000,-
5441.003	Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	100.000.000,-	100.000.000,-
5441.005	Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya	30.000.000,-	30.000.000,-
5441.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.000.000,-	350.000.000,-
5441.994	Layanan Perkantoran	17.890.024.000,-	20.443.385.000,-
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	5.000.000.000,-	5.000.000.000,-
TOTAL		52.554.509.000,-	62.326.918.000,-

## 2. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada Tahun 2019

Audit terhadap Pusat Diklat SDM LHK di tahun 2019 sesuai dengan hasil berita acara tanggal 1 November 2019 di Jakarta bahwa rekomendasi atas laporan hasil audit (LHA) Inspektorat Jenderal KLHK pada satker Pusat Diklat SDM LHK dengan catatan Nihil yang tertandatangani dari Inspektorat Jenderal KLHK dan Pusat Diklat SDM LHK.

## 3. Metode Pengukuran

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang penilaian capaian visi dan misi, dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula

sederhana yaitu menentukan persentase capaian kinerja, meliputi kinerja fisik, kinerja keuangan, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan capaian kinerja.

#### **a. Pengukuran Kinerja Sasaran**

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan capaian rencana dan/atau keberhasilan capaian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengukuran Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

#### **b. Evaluasi Kinerja**

Berdasarkan perhitungan Pengukuran Capaian Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap capaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang.

Berdasarkan pembatasan terhadap tingkat capaian kinerja yang telah disepakati oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminimalisir adanya bias dalam penghitungan capaian kinerja sasaran, khusus untuk sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja yang melebihi 150%, diasumsikan capaiannya maksimal hanya sebesar 150%.

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu juga, evaluasi dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja



(*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

### **c. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi capaian dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan apabila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

## **4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja**

### **a. Pengukuran Capaian Kinerja**

Implementasi pelaksanaan kegiatan Pusat Diklat SDM LHK sesuai nomenklatur dokumen perencanaan terakomodir dalam kegiatan dukungan penyelenggaraan diklat dan pelaksanaan tugas lainnya pada Pusat Diklat SDM LHK. Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Dalam hal pengukuran capaian kinerja, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kriteria capaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika capaiannya melebihi 80%. Berdasarkan kriteria tersebut, maka capaian indikator kinerja Pusat Diklat SDM LHK untuk kegiatan indikator kinerja pada kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK sebesar 99,81%, untuk lulusan Pendidikan S2 dan S3 sebesar 100%,



Pengelolaan KHDTK sebesar 100%, tenaga pendamping KTH sebesar 100% dan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan 99.55%, masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan.

Pada Tahun anggaran 2019, Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 2 (dua) kegiatan yang akan dicapai pada 6 (enam) Indikator Kinerja namun pada tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK tidak menyelenggarakan diklat Bakti Rimbawan. Sasaran tersebut adalah meningkatnya kapasitas SDM LHK dan tersedianya tenaga teknis kediklatan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

## **b. Efektivitas Kinerja**

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran/*outcome* Tahun 2019 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2017. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2019.

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya}}$$

Rasio yang dihasilkan > 1 terjadi peningkatan. Apabila rasio yang dihasilkan = 1 maka efektifitas capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya. Rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan efektifitas capaian kinerja sasaran yang menurun, sehingga perlu adanya percepatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang yang dirumuskan dalam Renja/RKT, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode Renstra. Pada Tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK dan BDLHK tidak menyelenggarakan kegiatan diklat tenaga Bakti Rimbawan, Efektifitas Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019, Tabel 13.



Tabel 13. Efektifitas Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi Fisik 2018	% Realisasi Fisik 2019	Efektifitas Kinerja	Keterangan
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK	100,00	99,81	1,00	Efektif
		Tersedianya Lulusan S2 dan S3	100,00	100,00	1,00	Efektif
		Terbentuknya KHDTK	100,00	100,00	1,00	Efektif
		Tersedianya tenaga bakti rimbawan	100,00	-	-	-
		Tersedianya tenaga pendamping KTH	100,00	100,00	1,00	Efektif
2.	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	99,56	99,55	1,00	Efektif
Rata-rata					1,00	Efektif

Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK memiliki rasio efektifitas dengan status efektif. Hal ini berarti Pusat Diklat SDM LHK meningkat dalam sasaran capaian kinerja.

### c. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2019. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2019.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian kinerja keuangan tahun berjalan}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan  $\geq 1$  maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk katagori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan  $< 1$ , maka capaian kinerja sasaran termasuk kategori kurang efisien. Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi fisik 2019	% Realisasi Anggaran 2019	Efisiensi Kinerja	Keterangan
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK	99,81	96,73	1,03	Efisien
		Tersedianya Lulusan S2 dan S3	100,00	91,31	1,09	Efisien
		Terbentuknya KHDTK	100,00	96,03	1,04	Efisien
		Tersedianya tenaga bakti rimbawan	-	-	-	-
		Tersedianya tenaga pendamping KTH	100,00	99,99	1,00	Efisien
2.	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	99,55	99,97	0,99	Tidak Efisien
Rata-rata					1,03	Efisien

Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK memiliki rasio efisiensi dengan status efisien, hal ini berarti Pusat Diklat SDM LHK efisien dalam menggunakan anggaran untuk kinerja.

#### **d. Rasio realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang ada pada renstra Pusat Diklat SDM LHK menunjukkan bahwa realisasi belum terpenuhi sesuai yang ditargetkan tetapi realisasi unit kegiatan KHDTK sudah melebihi dari target renstra karena merupakan program prioritas nasional bahkan melebihi target yang ditetapkan. Secara rinci rasio/perbandingan realisasi kinerja sampai



dengan tahun ini dengan target jangka menengah disajikan sebagaimana Tabel 15.

Tabel 15. Rasio realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 untuk target jangka menengah.

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra 2015-2019	Realisasi 2019						% Capaian Kinerja
			2015	2016	2017	2018	2019	s/d 2019	
1 Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	a Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	35.000 Orang	7.767 Orang	2.856 Orang	3.000 Orang	2.996 Orang	4.190 Orang	20.809 Orang	59,45
	b Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	340 Orang	65 Orang	63 Orang	85 Orang	85 Orang	75 Orang	373 Orang	109,70
	c Terbentuknya unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	7 Unit KHDTK	1 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	7 Unit	16 Unit	228,57
	d Tersedianya tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya	15.000 Orang	1.321 Orang	600 Orang	210 Orang	230 Orang	-	2.361 Orang	15,74
	e Tersedianya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya	5.000 Orang	569 Orang	420 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	1.889 Orang	37,78
2 Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (K3)	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	2.300 Orang	281 Orang	713 Orang	429 Orang	455 Orang	446 Orang	2.324 Orang	101,04

## 5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2019 pada Pusat Diklat SDM LHK dilakukan untuk seluruh hasil kegiatan pada penetapan kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 dan tertuang dalam dokumen RKA-



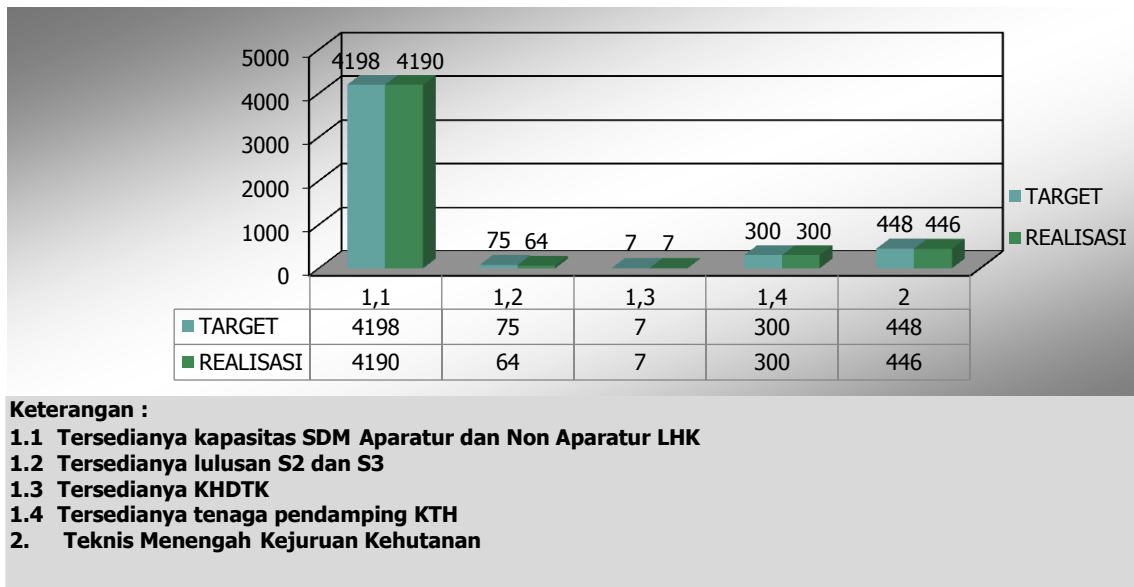
KL Satuan Kerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 mencakup output kegiatan. Pada Tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.

Kegiatan tersebut dicapai melalui 5 (lima) Indikator kinerja, yaitu:

- 1) Tersedianya kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK;
- 2) Tersedianya lulusan S2 dan S3;
- 3) Tersedianya KHDTK;
- 4) Tersedianya tenaga pendamping KTH; dan
- 5) Tersedianya tenaga teknis Menengah Kejuruan Kehutanan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja pada indikator kinerja lingkup Pusat Diklat SDM LHK (termasuk BDLHK dan SMKK) dijelaskan pada Lampiran 3.



Gambar 2. Grafik capaian kinerja Lingkup Pusat Diklat SDM LHK

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja Pusat Diklat SDM LHK dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK

- a. **Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK dapat meningkatkan kapasitasnya**

Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK merupakan salah satu tugas pokok dari Pusat Diklat SDM LHK melalui penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur yang terdiri dari:

- 1) Diklat Kepemimpinan;
- 2) Diklat Administrasi;
- 3) Diklat Teknis; dan
- 4) Diklat Fungsional.

Maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 dan Renja tahun 2019. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai Tabel 16.

Tabel 16. Target dan Realisasi Jenis Diklat di Pusat Diklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	% Persentase
1	Diklat Kepemimpinan	512	511	99,80
2	Diklat Administrasi	562	557	99,11
3	Diklat Fungsional	737	737	100
4	Diklat Teknis	2.387	2.385	99,92
Jumlah		4.198	4.190	99,81

Hasil capaian indikator kinerja kegiatan adalah jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebesar 4.190 orang.

Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat administrasi, diklat teknis dan diklat fungsional merupakan implementasi upaya peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur guna mendukung pembangunan nasional tahun 2015-2019.

Realisasi penyelenggaraan diklat Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK pada tahun 2019 sebanyak 4.190 orang dari target 4.198 orang dengan persentase 99,81%, untuk Pusat Diklat SDM LHK sebesar 1.596 orang terdiri dari kepemimpinan 511 orang, diklat administrasi 557 orang, dan diklat fungsional 528 orang. Dengan rincian diklat sebagai berikut:

- Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan bagi pejabat/calon pejabat struktural Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diklat Kepemimpinan yang telah diselenggarakan sebanyak 511 orang peserta dari target 512 orang dengan persentase 99,80%, terdapat 1 orang peserta diklat kepemimpinan Tk.IV yang mengundurkan diri, Rincian penyelenggaraan diklat kepemimpinan sebagaimana Tabel 20.

Tabel 17. Target dan Realisasi Diklat Kepemimpinan lingkup Pusdiklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi		Jumlah	
				Lk	Pr		
A	DIKLAT KEPEMIMPINAN		512	384	127	511	
1	Diklat Kepemimpinan Tk. II	101	15	8	7	15	7 Mei-13 September 2019 dan 8 Mei-6 September 2019
2	Diklat Kepemimpinan Tk. III:		99	75	24	99	
	Angkatan XX dan XXI	98	60	46	14	60	21 Juni-4 Oktober 2019
	Angkatan XXII dan XXIII	98	39	29	10	39	9 September-19 Desember 2019
3	Diklat Kepemimpinan Tk. IV:	103	398	301	96	397	
	Angkatan XXXI dan XXXII di Pusdiklat SDM LHK	103	60	47	13	60	25 Februari-19 Juni 2019
	Angkatan XXXIII dan XXXIV di Pusdiklat SDM LHK	103	60	45	15	60	28 Juli-15 November
	Angkatan XXXV di Pusdiklat SDM LHK	103	30	23	7	30	19 Agustus-4 Desember
	Angkatan XXXVI dan XXXVII di BDLHK Bogor	103	60	39	21	60	20 Agustus-4 Desember 2019
	Angkatan XXXVIII di BDLHK Kadipaten	103	35	24	11	35	20 Agustus - 4 Desember 2019
	Angkatan XXXIX di dan XL di BDLHK Samarinda	103	60	50	9	59	26 Agustus-11 Desember 2019
	Angkatan XLI di BDLHK Makassar	103	36	26	10	36	27 Agustus-11 Desember 2019
	Angkatan XLII dan XLIII di BDLHK Pekanbaru	103	57	47	10	57	3 September-20 Desember 2019





Gambar 3. Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Pusat Diklat SDM LHK

- Terselenggaranya Diklat Administrasi pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 557 orang peserta dari target 562 orang dengan persentase 99,11%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya aparatur lingkungan hidup dan kehutanan, yang mampu melaksanakan tugas merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan diklat di bidang administrasi. Rincian penyelenggaraan diklat administrasi sebagai Tabel 19.

Tabel 18. Target dan Realisasi Diklat Administrasi Lingkup Pusdiklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
I	DIKLAT ADMINISTRASI		562	323	234	557	
1	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan I di BDLHK Bogor	54	37	15	22	37	10 Oktober-18 Desember 2019
2	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan II dan III di BDLHK Kadipaten	54	70	58	12	70	9 sept - 13 Nov 2019
3	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I dan II	54	60	33	27	60	22 April-5 Juli 2019
4	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan III dan IV	54	60	34	26	60	29 April-15 Agustus 2019
5	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V dan VI	54	60	29	31	60	12 Juni-4 September 2019
6	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	54	59	36	23	59	8 Juli-11 September

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
	Angkatan VII dan VIII						2019
7	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan IX dan X	54	60	36	24	60	29 Juli-9 Oktober 2019
8	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XI dan XII	54	59	30	29	59	16 September-20 Nopember 2019
9	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XIII di BDLHK Bogor	54	32	14	18	32	10 Oktober-18 Desember 2019
10	Asesor (Recognition Current Competency) Kerjasama dengan BNSP	3	65	38	22	60	9-12 Desember 2019

- Terselenggaranya Diklat Fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 528 orang dari target 528 orang dengan persentase 100%, Diklat fungsional bertujuan untuk memenuhi kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Rincian penyelenggaraan diklat fungsional sebagaimana tercantum dalam Tabel 18.

Tabel 19. Target dan Realisasi Diklat Fungsional lingkup Pusdiklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
I	Diklat Fungsional		528	349	179	528	
1	Alih Tingkat Polhut Terampil ke Ahli	9	30	28	2	30	11-19 Maret 2019
2	Penjenjangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya	10	40	40	-	40	4 - 13 April 2019
3	Pembentukan Polhut Tingkat Terampil	15	26	14	12	26	5 - 19 September 2019
4	Pembentukan Polhut Tingkat Ahli	60	79	69	10	79	5 - 19 September 2019
5	Pembentukan PEH Tingkat Terampil	20	34	15	19	34	16-27 Mei 2019



No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
6	Pembentukan PEH Tingkat Ahli Angkatan I dan II	30	68	49	19	68	14-23 Oktober 2019
7	Pembentukan PEH Tingkat Ahli Angkatan III dan IV	30	68	31	37	68	24 Oktober-2 November 2019
8	Penjurangan Fungsional PEH Ahli Jenjang Madya	15	33	18	15	33	18-29 November 2019
9	Pembentukan Pengawasan Lingkungan Hidup	20	30	13	17	30	11 - 25 sept 2019
10	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	5	30	10	20	30	22-27 April 2019
11	Pembentukan Penyuluh Kehutanan Tk. Ahli di Kupang	18	60	32	28	60	9-13 Juli 2019 dan 11-20 November 2019
12	Penjurangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya di BDLHK P.Siantar	9	30	30		30	16 - 24 Oktober 2019

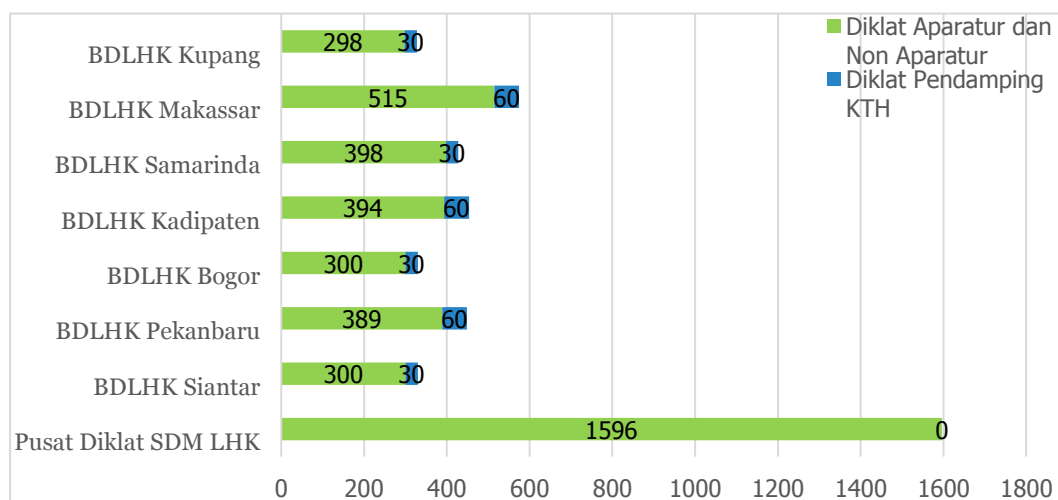
- Pada Tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK tidak menyelenggarakan diklat teknis bagi SDM aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan namun diselenggarakan di seluruh 7 Balai Diklat LHK. Diklat teknis bertujuan untuk memenuhi kompetensi teknis yang diperlukan dalam pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya aparatur lingkungan hidup dan kehutanan yang mampu melaksanakan tugas secara professional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Capaian kinerja kegiatan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya lingkup Pusat Diklat SDM LHK sudah tercapai sesuai penetapan kinerja sebagaimana Tabel 21.



Tabel 20. Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2015-2019	Target Kinerja 2019	Realisasi Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK dalam bidang kepemimpinan, administrasi, teknis dan fungsional meningkat 35.000 orang	4.198 orang	4.190 orang
		Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang.	75 orang	75 orang
		Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	7 unit	7 unit
		Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang	-	-
		Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 5.000 orang	300 orang	300 orang
2.	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	448 orang	446 orang

Sebaran jumlah peserta pelaksanaan pelatihan Pusdiklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK tahun 2019 yaitu:



Gambar 4. Sebaran Pelaksanaan Pelatihan di Pusat Diklat SDM LHK dan BDLHK Tahun 2019



**Keberhasilan** tercapainya jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya didukung oleh :

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai;
- b. Sumber daya manusia (widyaiswara dan pengelola diklat yang profesional dan kompeten);
- c. Anggaran yang memadai terutama dibiayai dengan rupiah murni;
- d. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop sesuai dengan yang direncanakan.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan diklat telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun ketercapaian tersebut masih memiliki **kendala** anggaran yang terbatas untuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kediklatan.

**Upaya tindak lanjut** melaksanakan diklat-diklat kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Lembaga Diklat Swasta dan lembaga lainnya.

Efektifitas capaian kinerja untuk kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya rasio yang dihasilkan sebesar 1 terhadap realisasi fisik tahun 2019, sehingga dikategorikan efektif sedangkan efisiensi capaian kinerja rasio dihasilkan sebesar 1,03 dengan kategori efisien.

Output indikator kinerja kegiatan yang mendukung jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebanyak 4.190 orang melalui kegiatan diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan administrasi bagi aparatur dan non aparatur LHK dengan outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari hasil Evaluasi Pasca Diklat tahun 2019 pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III formasi tahun 2018, berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi perubahan sikap kerja perilaku peserta setelah mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III tahun 2018, dengan indikasi:
  - a. Relevansi setiap mata pelatihan terhadap tugas dan fungsi Alumni (Alumni 87,23%, Atasan 89,59%, Rekan 84,94%).
  - b. Penerapan setiap mata pelatihan (Alumni 84,23%, Atasan 89,68%, Rekan 83,86%).
  - c. Diseminasi (Penyebarluasan) setiap mata pelatihan terhadap anggota organisasi (Alumni 84,38%, Atasan 89,97%, Rekan 79,76%).
  - d. Bimbingan, Kesempatan, Apresiasi dan Hambatan Penerapan Mata Pelatihan (Alumni 78,70%, Atasan 83,54%, Rekan 81,20%).
  - e. Data Perubahan Sikap Kerja (Alumni 83,88%, Atasan 83,88%, Rekan 84,05%).
  - f. Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi (Alumni 79,86%, Atasan 83,08%, Rekan 80,34%).
2. Pelatihan Dasar CPNS berdampak bagi peningkatan kinerja peserta dan organisasinya (Alumni 80,29%, Atasan 85,49%, Rekan 83,71%). Diklat Latsar CPNS 2018 sangat bermanfaat bagi alumni (CPNS) untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan dalam memapaki dunia kerja sebagai PNS. Alumni menjadi memahami perannya sebagai seorang PNS yang profesional, sehingga setelah mengikuti Latsar CPNS menjadi lebih percaya diri, kreatif dan inovatif.

Meningkatnya produktifitas kerja alumni juga ditandai dengan adanya inisiatif alumni untuk membuat forum diskusi secara rutin sebulan sekali dengan rekan kerja dan atasan. Forum diskusi dibuat sebagai ajang sharing hasil pengawasan/hasil kegiatan antara atasan, koordinator dan anggota tim lainnya. Ajang tersebut bisa sebagai sarana tempat belajar bagi pegawai baru, dan sebagai sarana untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi. Ide tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja alumni dan unit kerja secara keseluruhan.





Gambar 5. Suasana Kegiatan Pelatihan di Kelas

## b. Pendidikan Karyasiswa S2 dan S3

Pendidikan lanjutan bagi S2 dan S3 merupakan kebijakan dari Kementerian LHK untuk meningkatkan profesionalisme bagi aparatur SDM KLHK. Maksud dilaksanakannya kegiatan pendidikan S2 dan S3 untuk menghasilkan aparatur yang memiliki kapasitas peningkatan pengetahuannya dalam mengemban tugasnya di KLHK.

Output dari indikator kinerja kegiatan yang mendukung jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3).

a. Terwujudnya lulusan pendidikan karya siswa (S2 dan S3) bagi SDM LHK.

Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai implementasi dalam meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kehutanan.

Untuk mencapai hal di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pengelolaan pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur Lingkungan Hidup dan kehutanan di perguruan tinggi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Pasca Sarjana.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1) Pendidikan Magister (S-2)

Pendidikan Pasca Sarjana S-2 bagi pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibiayai dari anggaran Pusat Diklat SDM

Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruhnya untuk pendidikan di dalam negeri. Pendidikan program S-2 target lulusan tahun 2019 sebanyak 60 orang.

Hasil kegiatan ini adalah Bertambahnya pengetahuan & kemampuan pegawai kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-2. Keluarannya adalah Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-2.

Anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu APBN-P seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan Tahun pertama dan Tahun kedua pendidikan program S-2 dalam negeri pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkualifikasi pendidikan S-2.

## 2) Pendidikan Doktor (S-3)

Pendidikan Doktor (S-3) target lulusan tahun 2019 sebanyak 15 orang. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dalam pagu APBN-P untuk kegiatan Tahun ketiga dan Tahun keempat pendidikan program S-3 dalam negeri pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kualifikasi pendidikan

S-3. Hasil kegiatan tersebut adalah bertambahnya pengetahuan dan kemampuan pegawai Kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-3. Keluarannya adalah Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-3.

Kegiatan pendidikan lanjutan menghasilkan lulusan 75 orang dari target 75 orang di tahun 2019 dengan persentase 100%, untuk anggaran karyasiswa S2 APBN KLHK sebanyak 17 orang, Bappenas sebanyak 39 orang, LPDP sebanyak 3 orang, USAID Prestasi sebanyak 1 orang, Kementerian Pertahanan sebanyak 1 orang, Kementerian Komunikasi dan Informasi sebanyak 1 orang dan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia



sebanyak 1 orang. Karyasiswa S3 APBN KLHK sebanyak 10 orang dan Bappenas sebanyak 2 orang. Jumlah lulusan Pendidikan S2 dan S3 yang tersedia adalah sesuai data pada Tabel 22.

Tabel 21. Jumlah Lulusan Karyasiswa Pendidikan S2 dan S3

No.	Jenjang Pendidikan	2019	
		Target (orang)	Realisasi (orang)
1.	Penyelenggaraan Karyasiswa S2	60	63
2.	Penyelenggaraan Karyasiswa S3	15	12



Gambar 6. Presentasi Hasil Studi Karyasiswa untuk Program Doktor (S3)

**Keberhasilan** tercapainya jumlah pendidikan karyasiswa S2 dan S3 didukung oleh koordinasi/konsultasi yang efektif dengan para pihak, diantaranya Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK, serta Sekretariat Badan/Itjen/Ditjen lingkup KLHK.

**Kendala** berupa adanya keterlambatan karya siswa dalam menyelesaikan studi yang disebabkan oleh faktor individu (keluarga atau diri pribadi) maupun faktor luar/lingkungan.

**Upaya tindak lanjut** melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Perguruan Tinggi, melakukan pemantauan database dengan tindak lanjut menghubungi bersangkutan yang telah mencapai waktu lulus, memberikan surat tanggapan terhadap pelaporan kemajuan studi dan coaching clinic serta workshop bagi karya siswa yang diselenggarakan untuk mempertemukan dan membangun komitmen para pihak dalam penyelesaian tugas belajar S2 dan S3 KLHK serta keefektifan dalam monitoring dan evaluasi.

Efektifitas capaian kinerja untuk lulusan S2 dan S3 rasio yang dihasilkan sebesar 1,00 terhadap realisasi fisik 2019, sehingga dikategorikan efektif. Sedangkan efisiensi capaian kinerjanya rasio yang dihasilkan sebesar 1,09 dengan kategori efisien. Output indikator kinerja kegiatan yang mendukung lulusan S2 dan S3 sebanyak 75 orang melalui pendidikan lanjutan LHK di beberapa Perguruan Tinggi dengan outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya pegawai Kementerian LHK yang bertambah kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dalam mendukung pembangunan LHK.

### **c. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)**

Hutan Diklat merupakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan diklat, sesuai peraturan nomor 12 tahun 2010 tentang penelitian dan pengembangan serta diklat kehutanan. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) diperuntukkan sebagai sarana praktek diklat dalam mendukung penyelenggaraan diklat yang berkualitas. Pada Tahun 2019 Badan P2SDM telah berhasil memfasilitasi pengelolaan KHDTK sebanyak 7 unit dari target 7 unit atau dengan capaian sebesar 100%. Adapun lokasi KHDTK yang menjadi indikator kinerja berada di :

- 1) BDLHK Bogor: Operasional hutan diklat, Pemeliharaan demplot, Pemeliharaan arboretum, Pemeliharaan pal batas kawasan, Pengamanan Kawasan, Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan di KHDTK, Penanaman di KHDTK.
- 2) BDLHK Kadipaten: Penyusunan Draft Rencana Pengelolaan KHDTK Tahun 2020-2024, Demplot, Model, Lokasi Praktik, Petak Pemanfaatan, Instalasi pada KHDTK, Perlindungan KHDTK, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK.
- 3) BDLHK Kupang: Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK, Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat, Pengembangan Sarpras Kediklatan di KHDTK, Perlindungan Pengamanan dan Penyuluhan di KHDTK Hutan Diklat, Administrasi Evaluasi dan Pelaporan.



- 4) BDLHK Makassar: Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek KHDTK Tahun 2020, Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah KHDTK Tahun 2020-2024, Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK Tahun 2020-2039, Sarana Persuteraan Alam di Kampus Sudiang, Sarana Persemaian, Penyuluhan, Administrasi dan Pelaporan Kegiatan KHDTK, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pemeliharaan Peralatan, Pemeliharaan KHDTK.
- 5) BDLHK P.Siantar: Operasional KHDTK, Patroli Pengamanan KHDTK, Pemeliharaan Demplot, Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK.
- 6) BDLHK Pekanbaru: Kegiatan Rutin KHDTK Bukit Suligi, Pengelolaan KHDTK, Pemeliharaan Demplot, Perlindungan dan Pengamanan, Sosialisasi/ Penyuluhan Masyarakat Sekitar KHDTK, Biaya Operasional Penyuluh, Operasional Persemaian, Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK Bukit Suligi.
- 7) BDLHK Samarinda: Rencana pengelolaan KHDTK Hutan Diklat, Pemeliharaan dan Operasional Persemaian, Perlindungan dan pengamanan, Administrasi dan Pelaporan, Operasional Penyuluhan Kehutanan.

Pada tahun 2019 KHDTK masuk dalam program prioritas nasional bertujuan untuk mendukung Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) dalam kegiatan praktek siswa SMKK seperti persemaian, pembuatan demplot. Maksud pelaksanaan kegiatan KHDTK tersebut untuk memenuhi kepentingan penyelenggaraan diklat terutama sebagai sarana praktek diklat, dimana prinsip pengelolaan kawasan diklat tidak merubah fungsi hutan tersebut. Indikator kinerja kegiatan jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan adalah sebagai implementasi dari misi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur LHK dan non aparatur LHK. Terbentuknya unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan sebanyak 7 unit KHDTK. Secara fisik pengelolaan KHDTK



menghasilkan realisasi 7 unit KHDTK dari target 7 unit KHDTK dengan presentase 100%.

**Keberhasilan** dari tercapainya kegiatan KHDTK didukung oleh:

- a. Terbentuknya kelompok tani Hutan (KTH).
- b. Pengembangan kelola usaha KTH yang dibina oleh pembina/penyuluh hutan Diklat.
- c. Hutan diklat relatif aman dari gangguan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.
- d. Hutan diklat digunakan sebagai sarana praktek/pendidikan lingkungan bagi siswa sekolah dan perguruan tinggi.
- e. Hutan diklat digunakan sebagai sarana wisata.

Pada tahun 2019 terjadi **kendala** kurang optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di hutan diklat dan masih rendahnya pemahaman masyarakat sekitar KHDTK hutan diklat tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan kehutanan maupun bidang hukum.

**Upaya tindak lanjut** Untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

- a. Mengajukan permohonan usulan biaya pemeliharaan dan renovasi terhadap fasilitas yang ada di KHDTK Hutan Diklat.
- b. Peningkatan kemampuan SDM KHDTK Hutan Diklat.
- c. melakukan penyuluhan yang bertujuan untuk mengajak, memotivasi, memfasilitasi dan mendampingi masyarakat secara bersama sama untuk menjaga dan melestarikan KHDTK Hutan Diklat.
- d. Melakukan pola kerja sama dengan masyarakat sekitar hutan yaitu dengan pembentukan KTH.

Efektifitas capaian kinerja untuk KHDTK rasio yang dihasilkan sebesar 1,00 terhadap realisasi fisik 2019, sehingga dikategorikan efektif. Sedangkan Efisiensi capaian kinerjanya rasio yang dihasilkan sebesar 1,04 dengan kategori efisien. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya fasilitas pendukung kediklatan pada 7 KHDTK di BDLHK Pekanbaru, BDLHK Kadipaten, BDLHK Samarinda, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar dan BDLHK Kupang. Adapun Outcome dari kegiatan ini





yaitu pelaksanaan kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Badan P2SDM berjalan lebih optimal dengan tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan praktik di lapang.

**d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya**

Minimnya sumber daya manusia di bidang kehutanan baik dalam secara kualitas maupun kuantitas dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan kehutanan, mengingat sumber daya hutan yang sangat besar dan diiringi dengan laju pemanfaatan yang sangat tinggi pula sehingga dibutuhkan para rimbawan untuk merefleksikan ilmu dan pengetahuan mereka dalam tugas ini. Maksud dari dibentuknya bakti rimbawan adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung pembangunan kehutanan di Indonesia. Bentuk kegiatan Bakti Rimbawan berupa pelaksanaan Diklat Teknis Pengelolaan Hutan bagi Tenaga Bakti Rimbawan. Bentuk kegiatan tersebut berupa diklat Bakti Rimbawan merupakan salah satu bagian dari alur proses dari pengadaan bakti rimbawan yaitu dimana sesudah di terima menjadi tenaga Bakti Rimbawan diwajibkan mengikuti diklat, hal ini dimaksudkan untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sebelum peserta ditempatkan di tempat kerja masing-masing. Pelaksanaan diklat tersebut dilaksanakan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusdiklat SDM LHK dalam hal ini sebagai penyedia bahan ajar diklat, kurikulum dan silabus diklat, sertifikat/STTPP diklat, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat. Pada tahun 2019 penyelenggaraan diklat Bakti Rimbawan tidak dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan terkait berakhirnya program Bakti Rimbawan.

**e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 300 orang**

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam hutan terdapat banyak kekayaan alam yang bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan, mulai dari sumber air, penyedia kayu, tempat tumbuh flora dan fauna. Maksud dibentuknya KTH adalah program yang digagas pemerintah untuk diberikan akses yang



lebih kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Bentuk kegiatannya berupa penyelenggaraan Diklat Pendampingan Kelompok Tani Hutan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusdiklat SDM LHK dalam hal ini sebagai penyedia bahan ajar diklat, kurikulum dan silabus diklat, sertifikat/STTPP diklat, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat.

**Keberhasilan** tercapainya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan dengan meningkatnya kapasitas dan kompetensi bagi pendamping KTH dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dan juga mengingat banyaknya jumlah KTH yang telah tersebar di seluruh Indonesia sehingga diperlukan banyak tenaga pendamping masyarakat, baik dari unsur aparatur pemerintah (Penyuluh Kehutanan dan tenaga lainnya) maupun dari unsur Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang mampu melaksanakan pendampingan kepada KTH baik dalam kegiatan kelola kelembagaan, kelola kawasan maupun kelola usaha kehutanan.

**Kendala** karena peserta diklat KTH terdiri dari aparatur dan non aparatur, maka peserta masih ada yang belum mengerti terkait keperluan administrasi APBN seperti tiket pesawat yang harus dikumpulkan kepada panitia.

**Upaya Tindak Lanjut** perlu adanya pemberitahuan kepada peserta terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi.

Efektifitas capaian kinerja untuk KTH rasio yang dihasilkan sebesar 1,00 terhadap realisasi fisik 2019, sehingga dikategorikan efektif sedangkan Efisiensi capaian kinerjanya rasio yang dihasilkan sebesar 1,00 dengan kategori efisien. Output pada tahun 2019 penyelenggaraan Diklat Pendampingan Kelompok Tani Hutan sebanyak 300 orang yang dilaksanakan di 7 Balai Diklat LHK yaitu Balai Diklat LHK Bogor 30 orang, Balai Diklat LHK Kadipaten 60 orang, Balai Diklat LHK Kupang 30 orang, Balai Diklat LHK Makassar 60 orang, Balai Diklat LHK Pekanbaru 60 orang, Balai Diklat LHK Samarinda 30 orang, dan Balai Diklat LHK



Pematangsiantar 30 orang. Outcome dari penyelenggaraan Diklat ini adalah tersedianya tenaga pendamping KTH yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa-desa.

## **2. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.**

Departemen Kehutanan bersama Departemen Pendidikan Nasional telah bekerjasama membuka Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKK) sejak tahun 2008. Sebagai SMK Model dengan berbagai nilai keunggulan, SMKK ini diharapkan menjadi pelopor dan perintis munculnya sekolah-sekolah sejenis dimasa mendatang. SMKK yang dikembangkan merupakan SMKK di lima lokasi, yaitu Kadipaten, Pekanbaru, Samarinda, Makassar dan Manokwari. Kegiatan Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) menghasilkan sebanyak 446 orang dari target 448 orang dengan persentase 99,55%. Elemen kegiatan tersebut berupa pembinaan teknis dengan target fisik berupa 1 laporan sebesar 100%. Maksud dibentuknya SMKK Kehutanan adalah untuk menyediakan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang profesional, mandiri dan berahlak mulia serta siap memasuki lapangan kerja sesuai dengan kualifikasinya. Bentuk kegiatan yang mendukung pembinaan SMKK antara lain:

1. Penyusunan, pembahasan silabus dan bahan ajar mata pelajaran pembukaan wilayah hutan dan pengujian kayu gergajian, serta pembinaan hutan, dilaksanakan tanggal 18-21 Juni 2019.
2. Workshop persiapan uji kompetensi peserta didik SMK Kehutanan, dilaksanakan tanggal 22-24 Januari 2019.
3. Pembinaan Teknis SMK Kehutanan

Kegiatan pembinaan teknis SMKK Kehutanan bertujuan untuk memberikan pembinaan teknis kepada SMK Kehutanan yang di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu SMK kehutanan Kadipaten, SMK kehutanan Pekanbaru, SMK Kehutanan Samarinda, SMK kehutanan Makassar dan SMK kehutanan Makassar. Adapun kegiatannya yaitu Supervisi/monitoring/pengawasan penyelenggaraan SMK Kehutanan, menghadiri wisuda siswa SMK



Kehutanan, Rapat-rapat/koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait, *Supervisi/monitoring* pelaksanaan uji kompetensi SMK Kehutanan tahun 2019, pencetakan ulang bahan ajar SMK Kehutanan dan Konsultasi/koordinasi mengikuti rapat dengan instansi terkait penyelenggaraan SMK Kehutanan.

#### 4. Lomba Kompetensi SMK Kehutanan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM), Kementerian LHK, melakukan pembinaan terhadap 5 SMK Kehutanan Negeri dan 26 SMK lainnya yang memiliki jurusan kehutanan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna mendukung komitmen pemerintah dalam pembangunan SDM yang menitikberatkan pada pengembangan pendidikan vokasi. Lomba Kompetensi Siswa SMK Kehutanan (LKS) merupakan ajang unjuk kebolehan siswa siswi SMK Kehutanan seluruh Indonesia dalam penguasaan 4 bidang kompetensi keahlian, yaitu 1) Kompetensi Keahlian Teknik Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (TIPH), 2) Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH), 3) Teknik Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (TRRH) dan 4) Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSDH). Tujuan kegiatan LKS adalah untuk: (1) Menyediakan wahana bagi siswa SMK Kehutanan untuk mengasah karakter positif, produktif, kreatif, inovatif serta kecintaan terhadap alam dan lingkungan; (2) Memotivasi siswa SMK Kehutanan untuk meningkatkan keahlian sesuai standar kompetensi yang dapat menarik minat dunia usaha dan dunia industri; (3) Mempromosikan performa kerja siswa dan meningkatkan citra SMK Kehutanan; (4) Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif antara SMK Kehutanan dengan dunia usaha/dunia industri (DUDI), asosiasi profesi dan berbagai pihak lainnya; dan (5) Menyediakan sarana pengembangan dan pengakuan keunggulan kerja bagi siswa SMK Kehutanan yang memiliki kompetensi.

Lomba Kompetensi Siswa dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 15-16 November di Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc. Manggala



Wanabakti, Jakarta dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rumpin, Bogor.

5. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi guru SMK Kehutanan kompetensi keahlian teknik inventarisasi dan pemetaan hutan, mata pelajaran pengukuran dan perpetaan digital, dilaksanakan tanggal 9-23 Juli 2019 di BDLHK Kadipaten.
6. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas guru smk kehutanan kompetensi keahlian teknik produksi hasil hasil hutan mata pelajaran pengujian kayu bulat dan kayu gergajian, dilaksanakan selama 15 hari mulai tanggal 8-22 Oktober 2019 di Pusdiklat SDM LHK Bogor.
7. Pembahasan bank soal tahun 2020 pembahasan bank soal secara rutin dilaksanakan oleh Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya. Untuk tahun 2019, dilaksanakan tanggal 14 s/d 16 Mei 2019 di Hotel Onih - Bogor.
8. Workshop pengembangan alat bantu pembelajaran dengan multimedia, dilaksanakan tanggal 12-15 maret 2019 bertempat di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gunung Batu - Bogor.
9. Workshop manajemen pengelolaan boarding school, dilaksanakan tanggal 10-13 April 2019 bertempat di Kampus Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi guru SMK Kehutanan kompetensi keahlian teknik konservasi sumberdaya hutan mata pelajaran pembinaan populasi dan habitat, dilaksanakan tanggal 9-23 Juli 2019 bertempat di BDLHK Kadipaten.
11. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas guru smk kehutanan kompetensi keahlian teknologi produksi hasil hutan mata pelajaran pemanenan hasil hutan, dilaksanakan tanggal 28 oktober-4 november 2019 bertempat di Pusat Diklat SDM LHK dan praktek lapangan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cianjur Perum Perhutani.



12. Workshop pengelolaan kelas, dilaksanakan tanggal 16-19 Juli 2019.
13. Workshop pengembangan SMK Kehutanan, dilaksanakan tanggal 4-6 Desember 2019.
14. Penyusunan *School Business Plan* SMK Kehutanan, dilaksanakan tanggal 1-2 November 2019.

**Keberhasilan** dari kegiatan teknis menengah kejuruan kehutanan pelatihan kompetensi guru dapat dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum baru.

Output dari indikator kinerja kegiatan yang mendukung jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan adalah dokumen Perencanaan dan Pembinaan berupa laporan pembinaan SMKK, dengan outcome adalah meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan Kehutanan.

Capaian kinerja untuk SMKK pada tahun 2019 tidak tercapai sesuai target. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh adanya 2 siswa yang mengundurkan diri. Adapun tabel capaian kinerja sesuai tabel 23.

Tabel 22. Sebaran lulusan tenaga menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2019

No.	SMKK Negeri	Jumlah Siswa (orang)				Keterangan
		Target (Orang)	Realisasi			
			L	P	Jumlah	
1.	Kadipaten	94	75	19	94	Wisuda, 7 Mei 2019
2.	Pekanbaru	102	76	25	101	Wisuda, 2 Mei 2019
3.	Samarinda	109	81	28	109	Wisuda, 4 Mei 2019
4.	Makassar	97	78	19	97	Wisuda, 4 Mei 2019
5.	Manokwari	46	26	19	45	Wisuda, 9 Mei 2019
Jumlah		448	336	110	446	

**Kendala** yang dihadapi pada kegiatan ini adalah:

Kurangnya pengawasan perilaku dan cara belajar siswa SMKK oleh para tenaga pendidik dan kependidikan.

**Upaya tindak lanjut** dari permasalahan ini adalah:

Perlu pembinaan siswa secara intensif dari tenaga pendidik dan kependidikan secara bergantian dalam mengawasi perkembangan siswa

agar terhindar dari pelanggaran disiplin dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap siswa SMK Kehutanan Negeri.



Gambar 7. Praktek kerja bagi siswa SMK Kehutanan agar memiliki kompetensi dan siap berkompetisi di Dunia Usaha dan Dunia Industri



Gambar 8. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2019 Dilaksanakan di Arboretum KLHK dan BDLHK Bogor, 14-15 Nov 2019, di ikuti oleh 280 orang dari 5 SMK Kehutanan Negeri binaan KLHK dan 26 SMK Kehutanan binaan Kemendikbud

Efektifitas capaian kinerja untuk Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan rasio yang dihasilkan sebesar 1,00 terhadap realisasi fisik 2019, sehingga dikategorikan efektif. Sedangkan Efisiensi capaian kinerjanya untuk Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan rasio yang dihasilkan sebesar 0,99 dengan kategori tidak efisien. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya sebanyak 446 orang tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten. Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu pengelolaan kehutanan pada tingkat tapak dapat tercapai sesuai arahan dan sasaran pembangunan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **B. Realisasi Anggaran**

### **1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja**

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 adalah sebesar Rp.62.326.918.000,- dengan realisasi sebesar Rp.60.999.558.754,- atau sebesar 97,87%.

Pelaksanaan Capaian Anggaran IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 24 berikut.

Tabel 23. Pelaksanaan Capaian Anggaran IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target		Realisasi		%
1 Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya 35.000 orang	34.513.533.000,-	33.386.733.688,-	96,73	4.198	Orang	4.190	Orang	99,81
	b Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang	1.890.000.000,-	1.725.770.514,-	91,31	75	Orang	75	Orang	100
	c Terbentuknya unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK	100.000.000,-	96.028.700,-	96,03	7	Laporan	7	Laporan	100
	e Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 5.000 orang	30.000.000,-	29.996.506,-	99,99	300	Orang	300	Orang	100
2 Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	5000.000.000,-	4.998.736.070,-	99,97	448	Orang	446	Orang	99,55
Rata-Rata Capaian Fisik									99,87

## 2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut

Realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,87%, dan capaian fisik untuk APBN-P sebesar 99,87%. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK yang tidak mencapai target yaitu untuk lulusan tenaga teknis menengah





kejuruan kehutanan dengan target 448 orang, namun realisasinya sebesar 446 orang sehingga terdapat 2 orang yang tidak lulus yaitu di SMKK Pekanbaru 1 orang dan SMKK Manokwari 1 orang karena keduanya mengundurkan diri. Untuk itu perlu adanya peningkatan kedisiplinan terhadap siswa SMKK berupa tata tertib kesiswaan melalui pengawasan yang lebih diperketat dan remedial bagi siswa kelas 3 yang mengalami penurunan nilai.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan perangkat organisasi atau unit kerja eselon II yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan berada di bawah dalam pembinaan Badan P2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan 6 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu "Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK, tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa, tersedianya pengelolaan 7 unit KHDTK yaitu di BDLHK Pekanbaru, BDLHK Kadipaten, BDLHK Samarinda, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar dan BDLHK Kupang sebagai sarana pembelajaran kediklatan, tersedianya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya dan tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahunan IKK menghasilkan realisasi keuangan sebesar Rp.40.237.265.478,- dari target Rp.41.533.533.000,- atau 96,88%. Pagu Satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebesar Rp.62.326.918.000,- dengan realisasi sebesar Rp.60.999.558.754,- atau sebesar 97,87%.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 capaian kinerja fisik Pusat Diklat SDM LHK untuk meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 99,87%, masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan.

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan efisien dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai target yang diperjanjikan, dan mencapai rasio efektifitas dengan status efektif. Hal ini berarti Pusat Diklat SDM LHK telah efektif dalam meningkatkan capaian

kinerja sasaran. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja capaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.



# LAMPIRAN

**Lampiran 1.**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**TAHUN 2015-2019**

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah	
				2015	2017	2019	2019	2019		
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)										
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1)										
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Jumlah Kurikulum dan Silabus	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	Judul	25	25	25	25	25	
	B	Jumlah Modul		Judul	5	5	5	5	5	
	C	Jumlah Draft Peraturan Kediklatan		Peraturan	3	3	3	3	3	
	D	Laporan Identifikasi Kebutuhan Diklat		Laporan	1	-	1	1	1	
	E	Pelaksanaan Pengembangan E-LEARNING		Kegiatan	7	5	5	5	5	
	F	Jumlah Program Diklat		Buku	1	1	1	1	1	
	G	Laporan Rapat-rapat /Koordinasi /Konsultasi Perencanaan		Laporan	1	1	1	1	1	
Terwujudnya hutan diklat yang dikelola sesuai kriteria dan standar pengelolaan 7 unit	H	Pengelolaan KHDTK		Unit	1	2	2	1	1	
		1. Pudiklat		Laporan	1	1	1	1	1	
		2. BDLHK Pekanbaru		Unit		1				
		3. BDLHK Siantar		Unit			1			

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah
				2015	2017	2019	2019	2019	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1)									
	4. BDLHK Kadipaten		Unit			1			
	5. BDLHK Bogor		Unit				1		
	6. BDLHK Samarinda		Unit		1				
	7. BDLHK Makassar		Unit					1	
	8. BDLHK Kupang		Unit	1					

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah
				2015	2017	2019	2019	2019	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Laporan Evaluasi Pasca Diklat	Laporan	1	1	1	1	1	
	B	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Diklat	Laporan	1	1	1	1	1	
	C	Jumlah Majalah	Edisi	4	4	4	4	4	
	D	Jumlah	Judul	4	4	4	4	4	



Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah
				2015	2017	2019	2019	2019	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)									
		Leaflet/Kalender/Booklet/Poster							
	E	Jumlah Buku Terbitan Pusdiklat	Judul	5	5	5	5	5	
	F	Pengelolaan Informasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	
	G	Laporan Pengembangan Kerjasama Teknik Kediklatan	Laporan	1	1	1	1	1	
	H	Laporan Akreditasi Kelembagaan Diklat Eksternal dan Internal	Laporan	1	1	1	1	1	
	I	Laporan Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan	1	1	1	1	1	



Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah	
				2015	2017	2019	2019	2019		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)										
Diklat Teknis (EK1)										
Terselenggaranya diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 24.116 orang	A	Penyelenggaraan Diklat Teknis	Sub Bidang Diklat Teknis	Orang	5.184	1.832	5.700	5.700	5.700	<b>24.116</b>
		1. Pudiklat		Orang	966	81	3.405	2.070	1.970	8.490
		2. BDLHK Pekanbaru		Orang	660	270	360	720	720	2.730
		3. BDLHK Siantar		Orang	510	240	300	450	450	1.950
		4. BDLHK Kadipaten		Orang	570	210	330	600	600	2.310
		5. BDLHK Bogor		Orang	570	251	270	330	330	1.751
		6. BDLHK Samarinda		Orang	490	240	330	350	450	1.860
		7. BDLHK Makassar		Orang	830	300	375	580	580	2.665
		8. BDLHK Kupang		Orang	590	240	330	600	600	2.360
Terselenggaranya pembinaan pendidikan kehutanan tingkat menengah	B	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan								
		1. Pembinaan	Laporan	2	2	2	2	2		
Terselenggaranya diklat bakti rimbawan sebanyak 15000 orang	C	Penyelenggaraan Diklat Bakti Rimbawan	Orang	1.236	600	4.390	4.390	4.384	<b>15.000</b>	
		1. Pudiklat	Orang	1.236	-	-	-	-	1.236	





Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah
				2015	2017	2019	2019	2019	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Teknis (EK1)									
	2. BDLHK Pekanbaru		Orang	-	60	627	627	626	1.940
	3. BDLHK Siantar		Orang	-	30	627	627	626	1.910
	4. BDLHK Kadipaten		Orang	-	-	627	627	628	1.882
	5. BDLHK Bogor		Orang	-	250	628	628	626	2.132
	6. BDLHK Samarinda		Orang	-	80	627	627	626	1.960
	7. BDLHK Makassar		Orang	-	120	627	627	626	2.000
	8. BDLHK Kupang		Orang	-	60	627	627	626	1.940



Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah	
				2015	2017	2019	2019	2019		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)										
Diklat Teknis (EK1)										
Terselenggaranya diklat tenaga pendamping KTH sebanyak 5000 orang	D	Penyelenggaraan Diklat Pendamping KTH	Sub Bidang Diklat Teknis	Orang	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>1.350</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>5.000</b>
		1. Pudiklat		Orang	450	-	-	-	-	450
		2. BDLHK Pekanbaru		Orang	30	60	180	190	210	670
		3. BDLHK Siantar		Orang	60	60	180	210	180	690
		4. BDLHK Kadipaten		Orang	-	90	210	180	180	660
		5. BDLHK Bogor		Orang	30	60	210	180	180	660
		6. BDLHK Samarinda		Orang	30	60	210	180	180	660
		7. BDLHK Makassar		Orang	-	60	180	180	210	630
		8. BDLHK Kupang		Orang		60	180	180	160	580
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)										
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	A	Penyelenggaraan Diklat Fungsional	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	orang	648	265	1.260	1.260	1.170	<b>4.603</b>
		1. Pudiklat		orang	138	49	1.110	960	870	3.127
		2. BDLHK Pekanbaru		orang	60	-	30	60	60	210
		3. BDLHK Siantar		orang	30	30	60	60	60	240



Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah
				2015	2017	2019	2019	2019	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Teknis (EK1)									
		4. BDLHK Kadipaten	orang	90	30	-	30	30	180
		5. BDLHK Bogor	orang	60	66	-	-	-	126
		6. BDLHK Samarinda	orang	90	30	30	30	30	210
		7. BDLHK Makassar	orang	90	30	-	60	60	240
		8. BDLHK Kupang	orang	90	30	30	60	60	270
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 340 orang	B	Penyelenggaraan Karyasiswa S2 SDM LHK	orang	40	35	70	75	80	
	C	Penyelenggaraan Karyasiswa S3 SDM LHK	orang	5	5	15	10	5	
	D	Pengelolaan Karyasiswa	Kegiatan	4	3	3	3	3	



Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah	
				2015	2017	2019	2019	2019		
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)										
Diklat Kepemimpinan (EK1)										
Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan bagi pejabat/calon pejabat struktural Kementerian LHK sebanyak 83 orang DIKPIM II, 111 orang DIKPIM III, dan 254 orang DIKPIM IV	A	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Sub Bidang Diklat Kepemimpinan	orang	18	20	15	15	15	83
	B	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III		orang	21	-	30	30	30	111
	C	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV		orang	59	60	45	45	45	254
Diklat Administrasi (EK2)										
Terselenggaranya diklat administrasi lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 3.410 orang	A	Penyelenggaraan Diklat Administrasi	Sub Bidang Diklat Administrasi	orang	450	260	900	900	900	<b>3.410</b>
		1. Pudiklat		orang	300	140	780	720	720	2.660
		2. BDLHK Pekanbaru		orang	30	-	-	60	60	150
		3. BDLHK Siantar		orang	-	-	30	30	30	90
		4. BDLHK Kadipaten		orang	30	30	-	30	30	120
		5. BDLHK Bogor		orang	30	90	90	30	30	270
		6. BDLHK Samarinda		orang	-	-	-	-	-	-
		7. BDLHK Makassar		orang	30	-	-	-	-	30
		8. BDLHK Kupang		orang	30	-	-	30	30	90
Terselenggaranya diklat Prajabatan bagi CPNS Kementerian LHK sebanyak 2.423 orang	B	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan		orang	620	453	450	450	450	2.423



Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah	
				2015	2017	2019	2019	2019		
Layanan Program dan Umum (UK4)										
Program (EK1)										
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Renja	Sub Bagian Program	Buku	200	100	100	100	100	
	B	Penyempurnaan Renstra		Buku	100	100	-	-	-	
	C	Anggaran		Dokumen	1	1	1	1	1	
	D	ISO 9001:2015		Dokumen	1	1	1	1	1	
Kepegawaian (EK2)										
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian	Laporan	1	1	1	1	1	
	B	Pembinaan Pegawai		Laporan	1	1	1	1	1	
	C	Peningkatan Kemampuan Pegawai		Laporan	1	1	1	1	1	
	D	Kewidyaiswaraan		Laporan	1	1	1	1	1	
Umum (EK3)										
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Ketatausahaan	Sub Bagian Umum	Bulan	12	12	12	12	12	
	B	Pengelolaan Arsip dan Barang Inventaris		Kegiatan	6	6	6	6	6	
	C	Pengelola Keuangan		Kegiatan	24	24	24	24	24	
	D	Operasional Perkantoran		Bulan	12	12	12	12	12	



	E	Honor Pengelolaan Keuangan		Bulan	12	12	12	12	12	
	F	Penambah Daya Tahan Tubuh Bagi Satpam		Orang	8	8	8	8	8	
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	A	Perawatan Kendaraan		Unit	26	26	26	26	26	
	B	Perawatan Gedung		Bulan	12	12	12	12	12	
	C	Perawatan Sarana Kantor		Bulan	12	12	12	12	12	
	D	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		Paket	5	-	-	-	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Target Per Tahun					Jumlah
				2015	2017	2019	2019	2019	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Teknis (EK1)									
Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada 5 unit kerja SMK Kehutanan	A	Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan		281	718	464	480	480	2.425
		1. Pusat Diklat SDM LHK	Dokumen	1	1	1	1	1	
		2. SMKKN Pekanbaru	Orang	85	158	98	97	104	513
		3. SMKKN Kadipaten	Orang	58	185	97	106	102	519
		4. SMKKN Samarinda	Orang	61	144	88	107	108	508
		5. SMKKN Makassar	Orang	59	137	88	92	99	475
		6. SMKKN Manokwari	Orang	47	123	80	80	80	410



Lampiran 2.



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.**

**Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Ir. Helmi Basalamah, M.M.**

**Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**Ir. Helmi Basalamah, M.M.**  
NIP. 19611119 198802 1 001

Pihak Pertama,

**Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.**  
NIP. 19701130 199503 2 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2015-2019	Target Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM Aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 35.000 orang	4.198 Orang
		Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang	75 orang
		Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit	7 unit
		Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya, 5.000 orang	300 orang
2.	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	448 orang

**Kegiatan**

1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK
2. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

**Anggaran**

**Rp62.326.918.000,-**

Jakarta, Oktober 2019

Pihak Kedua,



**Ir. Helmi Basalamah, M.M.  
NIP. 19611119 198802 1 001**

Pihak Pertama,



**Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19701130 199503 2 001**



### Lampiran 3.

#### Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Kegiatan		Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target		Realisasi		%
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM LHK	a. Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya 35.000 orang	34.513.533.000,-	33.386.733.688,-	96,73	4.198	Orang	4.190*	Orang	99,81
			b. Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang	1.890.000.000,-	1.725.770.514,-	91,31	75	Orang	75	Orang	100
			c. Terbentuknya unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK	100.000.000,-	96.028.700,-	96,03	7	Unit	7	Unit	100
			d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang	-	-	-	-	-	-	-	-
			e. Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 5.000 orang	30.000.000,-	29.996.506,-	99,99	300	Orang	300	Orang	100
2.	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	5000.000.000,-	4.998.736.070,-	99,97	448	Orang	446	Orang	99,55

Keterangan : (\*) Realisasi Pusdiklat SDM LHK sebanyak 1.596 orang, BDLHK Bogor sebanyak 300 orang, BDLHK Kadipaten sebanyak 394 orang, BDLHK Pematangsiantar sebanyak 300 orang, BDLHK Pekanbaru sebanyak 389 orang, BDLHK Samarinda sebanyak 398 orang, BDLHK Makassar 515 orang dan BDLHK Kupang 298 orang.

## LAMPIRAN 4

INDIKATOR KEGIATAN	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	ELEMEN KEGIATAN	TARGET	LOKASI	PAGU ALOKASI (Rp)	
<b>Jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya</b>	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	Perencanaan dan Pengembangan E-Learning		Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	4.657.000.000	
			Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama				Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat
				Diklat Fungsional dan Karyasiswa	528 orang	Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	7.598.285.000
		Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi		Diklat Kepemimpinan	512 orang	Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	10.345.889.000
				Diklat Administrasi	562 orang	Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	7.352.548.000
		Layanan Program dan Umum		Program		Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	546.198.000
				Kepegawaian		Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	634.093.000
				Umum		Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	2.185.794.000
	<b>Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa (S2 dan S3)</b>	Penyelenggaraan Diklat Teknis		Diklat Fungsional dan Karyasiswa	75 orang	Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	1.890.000.000
	<b>Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya</b>	Layanan Program dan Umum		Program	300 orang	Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	30.000.000
<b>Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kegiatan</b>	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning		Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	7 unit	Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	100.000.000	

INDIKATOR KEGIATAN	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	ELEMEN KEGIATAN	TARGET	LOKASI	PAGU ALOKASI (Rp)
<b>Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia (Non Prioritas Nasional)</b>	Penyelenggaraan Diklat Teknis	Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang terampil	Diklat Teknis	448 orang	Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	5.410.000.000
<b>Layanan Perkantoran</b>	Layanan Program dan Umum	Terpenuhinya layanan perkantoran	Umum	12 bulan	Pusdiklat SDM LHK, Bogor, Jawa Barat	20.793.385.000
<b>TOTAL</b>						<b>62.326.918.000</b>



## Lampiran 5.

### Indikator Kinerja Satuan Kerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

Uraian	Indikator	Volume/Satuan
Meningkatnya kemampuan aparatur lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelenggaraan diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan administrasi, diklat fungsional, (K1)	Terselenggaranya diklat Prajabatan bagi CPNS Kementerian LHK	2.423 Orang
	Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan bagi pejabat/calon pejabat struktural Kementerian LHK sebanyak 83 orang DIKPIM II, 111 orang DIKPIM III dan 254 orang DIKPIM IV	448 Orang
	Terselenggaranya diklat teknis dan administrasi lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan	27.526 Orang
	Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK dan dinas/instansi kehutanan pada Pemda	4.603 Orang
Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan (K2)	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan tenaga kediklatan	1 Unit Kerja
Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan (K3)	Terselenggaranya pembinaan pendidikan tingkat menengah	1 Unit Kerja
Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga kependidikan (K4)	Terselenggaranya pembinaan pendidikan kehutanan tingkat menengah	5 Unit kerja



Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (K5)	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan	340 Orang
Meningkatnya kemampuan organisasi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyelenggarakan diklat lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas (K6)	Penyusunan rencana program anggaran	1 Laporan
	Renstra	1 Laporan
	Renja	1 Laporan
	IKD	1 Laporan
	ISO	1 Dokumen
	Layanan Perkantoran	12 Bulan
	Operasional Perkantoran	12 Bulan
	Pengelola Keuangan, BMN, SAI, Kepegawaian	12 Bulan
	Bahan Peraturan	15 Peraturan
	Kerjasama teknik	5 Laporan
	Modul	25 Judul
	Kurikulum dan Silabus	125 Judul
	Penerbitan majalah	20 Edisi
	Leaflet dan booklet	20 Judul
	Pengelolaan Sistem Informasi Kediklatan	5 Kegiatan
	Monev Penyelenggaraan Diklat	5 Laporan
Evaluasi Pasca Diklat	1 Laporan	
Mewujudkan hutan diklat yang dikelola sesuai kriteria dan standar Pengelolaan (K7)	Terwujudnya hutan diklat yang dikelola sesuai kriteria dan standar pengelolaan	7 Unit
Tersedianya sarana dan prasarana diklat dan pendidikan (K8)	Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	1 Unit kerja

